



**PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN  
MASYARAKAT KOTA  
DAERAH JAWA TENGAH**



en Direktorat  
budayaan

826  
H

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
1994/1995**

711.4826  
CATH  
P

**PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN  
MASYARAKAT KOTA  
DAERAH JAWA TENGAH**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
1994/1995**



**PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN  
MASYARAKAT KOTA  
DAERAH JAWA TENGAH**

**Tim Peneliti :**

**Cahyo Budi Utomo  
Sotomo WE  
Irawan HG  
Ibrahim**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
BAGIAN PROYEK PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN  
NILAI-NILAI BUDAYA  
JAWA TENGAH  
1994/1995**

## KATA PENGANTAR

Penerbitan buku tentang Kebudayaan Daerah yang dilaksanakan melalui Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Jawa Tengah tahun 1994/1995 yang berjudul "PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KOTA DAERAH JAWA TENGAH".

Naskah ini merupakan hasil penelitian dari Bagian Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Jawa Tengah tahun 1992/1993. Penerbitan Penggandaan buku buku tersebut merupakan upaya dalam rangka penyebaran hasil penelitian dan perekaman kebudayaan daerah yang sangat tinggi nilainya.

Dengan terbitnya buku ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam segala hal, mulai dari tahap penelitian, tahap editorial dan penyesuaian bahasa. Penyusunan buku ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan kami dalam segala hal.

Oleh karena itu demi kesempurnaan kami mohon saran dan koreksi para pembaca yang budiman.

Akhirnya kami berharap buku ini bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat dijadikan daya rangsang dan masukan untuk penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

Semarang, 20 Oktober 1994

Pemimpin Bagian Proyek Pengkajian  
dan Pembinaan Nilai-nilai  
Budaya Jawa Tengah



  
Drs. AGUS DONO KARNADI  
NIP. 130932236

**SAMBUTAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI JAWA TENGAH**

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut gembira diterbitkannya hasil penelitian Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Jawa Tengah tahun 1994/1995 dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya serta merupakan upaya pelestarian kebudayaan daerah.

Harapan saya semoga dengan diterbitkannya hasil Penelitian ini dapat disebarluaskan kepada masyarakat, khususnya kepada peserta didik untuk dapat mengetahui lebih jauh informasi budaya melalui hasil penelitian ini. Dengan belajar dan memahami berbagai informasi budaya daerah diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat dalam meningkatkan kecintaannya terhadap budayanya sendiri, yang pada gilirannya akan dapat memperkuat jatidiri kita.

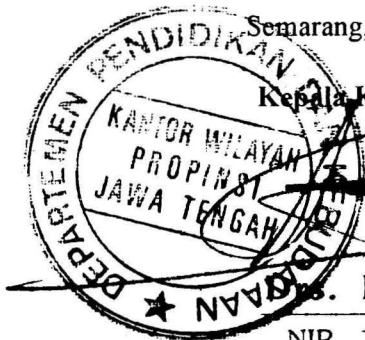
Di samping hal-hal sebagaimana tersebut di atas juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dalam menangkal pengaruh negatif budaya asing.

Saya berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembinaan dan pengembangan budaya bangsa.

Akhirnya tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Semarang, 20 Oktober 1994

Kepala Kantor Wilayah.



**KOESNO**

NIP. 13009890



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR PETA.....	ix
DAFTAR GAMBAR/FOTO.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah.....	2
C. Tujuan .....	3
D. Ruang Lingkup.....	3
E. Metodologi.....	4
F. Hasil.....	8
G. Kerangka Laporan.....	8
BAB II. GAMBARAN UMUM KOTA DAN DAERAH PENELITIAN.....	11
A. Gambaran Umum Kota Surakarta .....	11
B. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	15
C. Berbagai Permasalahan Kota.....	25
BAB III. DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN KELURAHAN GILINGAN.....	27
A. Disiplin dalam Penanganan Limbah Keluarga/Sampah.....	27
B. Disiplin dalam Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Sosial .....	30
C. Disiplin dalam Hubungan Ketetangaan.....	40
D. Disiplin terhadap Administrasi Pemerintahan.....	42
BAB IV. DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN TEMPAT- TEMPAT UMUM DI KELURAHAN GILINGAN.....	47
A. Disiplin di lingkungan Pasar.....	47
B. Disiplin di lingkungan Terminal.....	50
C. Disiplin di lingkungan Tempat Hiburan .....	55
D. Disiplin di Jalan Raya.....	57

<b>BAB V. UPAYA PEMBINAAN DISIPLIN PADA</b>	
<b>MASYARAKAT KOTA.....</b>	<b>67</b>
<b>A. Pembinaan Oleh Pemerintah .....</b>	<b>69</b>
<b>B. Pembinaan Oleh Tokoh Masyarakat.....</b>	<b>72</b>
<b>BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR PETA

	<b>Halaman</b>
1. PETA JAWA TENGAH.....	13
2. PETA KODIA SURAKARTA.....	14
3. PETA KELURAHAN.....	17



## DAFTAR GAMBAR/FOTO

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Berbagai kegiatan UPGK.....	30
Gambar 2. Keadaan di dalam Kantor Kelurahan.....	44
Gambar 3. Pasar Ngemplak.....	48
Gambar 4. Penumpang turun dari Bis.....	52
Gambar 5. Petugas Kebersihan di Terminal.....	54
Gambar 6. Poster di UP Teatre.....	56
Gambar 7. Truk yang "nyerobot".....	59
Gambar 8. Penyeberang jalan dan Bis yang berhenti.....	61
Gambar 9. Suasana di perempatan Gilingan.....	64

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1. Komposisi Penduduk Dilihat Dari Umur dan Jenis Kelamin.....	16
Tabel II.2. Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	19
Tabel II.3. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	19
Tabel II.4. Jumlah Gedung Sekolah, Guru dan Murid Menurut Jenis Sekolah .....	20

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu hidup berkelompok. Melalui kerjasama dalam kelompoknya itulah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Betapapun ukuran dari pengelompokan sosial tersebut diperlukan sebuah organisasi sebagai wadah pemersatunya. Ada empat hal utama yang terdapat di dalam sebuah pengelompokan masyarakat, yaitu pemilahan sosial, sarana penghubung, kaidah-kaidah sosial, dan pengendalian sosial (Prof. Dr. S. Budhisantoso, 1990).

Kota sebagai satuan wilayah pemukiman pada hakekatnya merupakan salah satu tempat di mana manusia mengadakan pengelompokan sosial. Kota biasanya ditandai dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan heterogenitas masyarakat yang tinggi. Pertumbuhan penduduk di kota sangat dipengaruhi oleh derasnya arus urbanisasi dari daerah belakang dan sekitarnya yang terjadi secara kontinum. Kota sebagai pusat pelayanan dengan berbagai fasilitasnya itulah yang antara lain menjadi daya tarik utama penduduk pendatang dari daerah sekitarnya.

Jadi, pada hakekatnya ada beberapa faktor utama yang menyebabkan perkembangan kota pada umumnya, yaitu pertumbuhan penduduk alami maupun karena urbanisasi (migrasi desa-kota), dan perkembangan aktivitas dunia usaha serta perubahan kehidupan penduduk. Semuanya itu membutuhkan berbagai fasilitas dan sarana pelayanan, seperti perumahan, pelayanan sosial, angkutan, air bersih, dan pelayanan-pelayanan sosial lainnya. Akan tetapi dengan segala keterbatasannya yang ada, keadaan seperti itu justru menimbulkan permasalahan perkotaan pada umumnya.

Pertambahan penduduk yang tinggi dan kurangnya berbagai prasarana dan sarana kehidupan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan di daerah perkotaan. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi di kota besar di Indonesia antara lain adalah masalah pencemaran lingkungan sebagai akibat pengelolaan limbah yang kurang benar, masalah transportasi, masalah kesempatan kerja, masalah pemukiman yang kurang memenuhi persyaratan hidup, dan berbagai masalah sosial kemasyarakatan seperti kriminalitas dan masalah tuna susila. Ketatnya persaingan masyarakat untuk mendapatkan prasarana dan sarana kehidupan, tidak jarang orang kurang memperhatikan orang lain demi untuk pemenuhan kebutuhan pribadinya. Sehubungan dengan hal itu, kurangnya pemahaman sejumlah warga kota terhadap lingkungannya di mana mereka tinggal, juga mempunyai andil



yang cukup besar terhadap munculnya berbagai permasalahan di perkotaan. Sejumlah warga kota masih bersikap dan berperilaku seperti di daerah asalnya.

Munculnya permasalahan di daerah perkotaan tersebut antara lain sangat dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan warga kota dalam mentaati segala peraturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Seperti telah tersirat di atas, bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki aturan-aturan, kaidah-kaidah sosial, dan pengendalian sosial tertentu untuk menjaga keberlangsungan kelompoknya itu. Demikian pula halnya dengan kelompok masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Sehubungan dengan itu pula, untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat perlu adanya pembinaan disiplin terhadap warga masyarakat yang bersangkutan.

Secara struktural, disiplin mengandung pengertian: (1) keseluruhan pranata yang mengatur tingkah laku agar sesuai dengan ketentuan masyarakat, (2) keseluruhan proses latihan dan pendidikan, sesuai dengan pranata tersebut, dan (3) sifat perilaku yang sesuai dengan pranata kemasyarakatan yang bersangkutan (Mardiatmadja, 1988).

Selanjutnya Mardiatmadja menyatakan bahwa, keseluruhan pranata yang disebut disiplin menunjuk pada aturan-aturan yang sistematis demi keserasian hidup bersama. Proses latihan yang juga disebut disiplin, adalah usaha untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada dan akhirnya setiap orang diharapkan berperilaku sesuai dengan pranata masyarakatnya.

Disiplin dalam masyarakat memang penting untuk dibina dan ditegakkan, karena disiplin itu merupakan modal keberhasilan dari setiap kegiatan. Dengan menegakkan disiplin dalam masyarakat pada dasarnya juga dalam rangka mempersiapkan manusia (masyarakat) yang bersangkutan agar mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Dengan disiplin, maka secara teoritis akan dapat memberikan rangsangan dan dorongan, agar mereka (masyarakat) dapat menjadi manusia yang lebih produktif.

Begitu pentingnya pembinaan disiplin di kalangan masyarakat sehingga terungkap pula dalam Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut GBHN, pembinaan disiplin nasional diarahkan untuk memperbaiki kesetiakawanan nasional, menanamkan sikap tanggung rasa, hemat dan prasaja, bekerja keras, cermat, tertib, penuh rasa pengabdian, jujur, dan mandiri. Karena amanat inilah, maka penelitian tentang pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat kota perlu dilakukan.

## **B. Masalah**

Dalam kehidupan sehari-hari berbagai permasalahan muncul dipertanian, Perpaduan antara kurang memudahinya prasarana dan sarana kehidup-

an, dengan kurangnya pemahaman warga kota terhadap tata aturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku di perkotaan diduga menyebabkan kekurangdisiplinan warga masyarakatnya. Sehubungan dengan hal itu, pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat disiplin warga masyarakat di lingkungan perkotaan.
2. Aturan dan kaidah-kaidah sosial apa saja yang berlaku pada lingkungan masyarakat perkotaan.
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam rangka pembinaan disiplin pada masyarakat perkotaan.

### **C. Tujuan**

Berkenaan dengan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan tingkat disiplin warga masyarakat di beberapa daerah perkotaan di Indonesia. Sebagai acuan sampai sejauh mana tingkat disiplin warga masyarakat perkotaan, dalam kajian ini akan diungkap pula aturan-aturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku di kalangan masyarakat perkotaan. Upaya pembinaan disiplin yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, dalam masalah ini dapat digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana warga masyarakat telah mematuhi berbagai aturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Karena itu pengungkapannya juga merupakan tujuan dari penelitian ini.

Data dan informasi tentang pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat perkotaan sangatlah penting artinya bagi perumusan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh terhadap warga di daerah perkotaan. Hal ini penting artinya mengingat semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan yang muncul di daerah perkotaan sejalan dengan berkembangnya kota itu sendiri. Asumsinya dalam penelitian ini adalah semakin padat penduduk suatu lingkungan pemukiman semakin rendah tingkat disiplin warga masyarakatnya.

### **D. Ruang Lingkup**

Penelitian tentang pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat perkotaan dilakukan pada dua lokasi tempat berlangsungnya aktivitas masyarakat, yaitu di lingkungan pemukiman penduduk, dan di tempat-tempat umum. Melalui data dan informasi yang terkumpul di lokasi penelitian itu diharapkan dapat mencerminkan permasalahan kedisiplinan yang terdapat di kota yang bersangkutan.

Kedua lokasi lingkungan sebagai lokasi penelitian tersebut merupakan daerah pusat keramaian, di mana di situ terdapat berbagai permasalahan yang disebabkan karena kurangnya disiplin warga masyarakatnya. Yang

dimaksudkan dengan tempat-tempat umum dalam penelitian ini adalah di lingkungan pusat perbelanjaan (pasar dan pertokoan), lingkungan terminal, lingkungan tempat hiburan, dan lingkungan jalan raya (padat lalu lintas).

Data dan informasi yang diungkap di lingkungan pemukiman antara lain adalah mengenai disiplin warga masyarakat terhadap penanganan limbah keluarga, kebersihan lingkungan, partisipasi warga masyarakat terhadap kegiatan sosial, administrasi pemerintahan (kelurahan), dan hubungan masyarakat dalam bertetangga. Sementara itu, pada lingkungan tempat-tempat umum (pasar, kompleks pertokoan, terminal, tempat-tempat hiburan, dan jalan raya), data dan informasi yang diungkap adalah mengenai disiplin masyarakat terhadap kebersihan, aturan-aturan dalam pelayanan, aturan-aturan di tempat umum, dan disiplin masyarakat terhadap peraturan-peraturan formal.

## **E. Metodologi**

Dalam bagian ini akan dijelaskan secara singkat berbagai hal pokok yang berkaitan dengan metodologi penelitian deskriptif kualitatif, khususnya yang dipergunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### *1. Bentuk dan Strategi Penelitian*

Bentuk dan strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Bentuk ini diharapkan mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi yang penuh nuansa. Hal ini sesuai dengan masalah yang dikaji sangat berkaitan dengan proses dan makna dari aktivitas masyarakat.

### *2. Lokasi Penelitian*

Agar pembahasan dapat menjangkau satu kesatuan yang utuh, maka lingkungan pemukiman yang diambil untuk objek penelitian ini merupakan satu kesatuan yang utuh pula. Dalam hal ini, tahap pertama dipilih satu lingkungan administrasi kecamatan. Kecamatan yang dipilih mempunyai: (1) penduduk padat, serta (2) mobilitas dan aktivitas penduduknya cukup tinggi. Kecamatan yang terpilih sebagai lokasi penelitian ini adalah kecamatan Banjarsari Kotamadia Surakarta.

Tahap kedua adalah, dari kecamatan yang terpilih itu kemudian diambil (dipilih) lokasi penelitian, yaitu lingkungan pemukiman, dan lingkungan tempat-tempat umum. Lokasi dalam penelitian ini, kebetulan ada dalam satu wilayah kelurahan, yaitu kelurahan Gilingan, Banjarsari, Surakarta. Kriteria yang diambil dalam menentukan Kelurahan Gilingan sebagai lokasi penelitian terutama ditekankan pada pertimbangan-pertimbangan: (1) tersedianya



fasilitas-fasilitas umum seperti pasar, terminal besar, tempat hiburan (bioskop/teatre), jalan raya padat lalu lintas, dan (2) heteroginitas penduduknya dan mobilitas serta aktivitasnya cukup tinggi, hal ini dapat dilihat baik dari kewarganegaraan, pekerjaan, urban (pendatang), pengangguran, agama, jumlah rumah dan keanekaragaman bentuk fisiknya.

### 3. *Sumber Data*

Berbagai sumber data yang telah dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Informan yang terdiri dari para tokoh masyarakat (formal maupun non formal), kelompok masyarakat.
- b. Tempat dan peristiwa yang meliputi perkampungan, kantor kelurahan, pasar, pertokoan, terminal, jalan raya. Dengan cara demikian akan dapat diketahui aktivitas yang terjadi dengan sesungguhnya. Artinya tidak hanya didasarkan atas apa yang dikatakan oleh seorang informan, melainkan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
- c. Dokumen resmi yang berkaitan dengan pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat perkotaan, dan monografi kelurahan penelitian.

### 4. *Teknik Pengumpulan Data*

Sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka beberapa teknik pengumpulan data yang telah dipergunakan adalah:

#### a. Wawancara

Teknik wawancara tidak dilakukan secara tertutup, kaku dan formal, melainkan dilaksanakan secara luwes, terbuka akrab dan penuh kekeluargaan. Kelonggaran cara ini ternyata mampu mengorek dan menangkap kejujuran informan untuk menemukan informasi yang sebenarnya, terutama informasi yang berkaitan dengan persepsi, sikap, perasaan mereka terhadap masalah pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat kota, sehingga dapat dibedakan antara informasi yang sesungguhnya dengan informasi yang semu.

#### b. Observasi

Teknik ini merupakan salah satu cara yang cukup baik untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu cara yang baik untuk mencocokkan data dan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Dengan cara demikian, maka validitas data yang diperoleh akan lebih akurat (sahih). Observasi ini dilakukan secara formal maupun tidak formal untuk mengamati berbagai peristiwa dan kondisi aktivitas warga sehari-hari di sekitar lokasi penelitian.

### c. Studi Kepustakaan dan Mencatat dokumen

Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data yang telah terdokumentasi yang berkaitan dengan masalah pembinaan disiplin dilingkungan masyarakat perkotaan. Melalui studi ini dapat dihasilkan data-data sekunder dalam rangka mengungkap lokasi, kependudukan, dan berbagai kasus pelanggaran disiplin atau kurang dijalanannya suatu aturan, berbagai macam peraturan yang umumnya bersifat formal juga dapat dikumpulkan melalui studi ini.

### 5. Teknik Cuplikan

Dalam penelitian kuantitatif teknik sampling lebih ditujukan untuk menarik generalisasi yang bersifat statistik dari suatu populasi. Sedangkan penelitian kualitatif lebih bersifat *purposive sampling*, di mana peneliti lebih cenderung untuk memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya sebagai sumber data yang mantap dan mengetahui permasalahan secara mendalam (Sutopo, 1988).

Teknik cuplikan semacam ini lebih tepat disebut *internal sampling*. Dalam menentukan informan yang tepat, ditentukan atas dasar informasi formal maupun informal. Pemilihan informan secara tepat akan membantu peneliti agar secepatnya dan seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat (Lincoln & Guba, 1985). Kecuali itu, informan yang dipilih secara tepat berfungsi untuk membantu menjangkau informasi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat, untuk bertukar pikiran, atau untuk membandingkan suatu informasi yang diperoleh dari informan lain (Bogdan & Biklen, 1984).

Mengingat pentingnya informan, maka dalam pelaksanaan pemilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan dalam mengumpulkan data.

### 6. Validitas Data

Validitas data merupakan faktor penting dalam penelitian, oleh karena itu perlu pemeriksaan data sebelum analisis dilakukan. Ada beberapa teknik pemeriksaan data yang dapat diperunakan untuk meningkatkan atau mengetahui validitas data, seperti triangulasi, review informan, member check, menyusun data base, dan penyusunan semua mata rantai bukti penelitian (Sutopo, 1990).

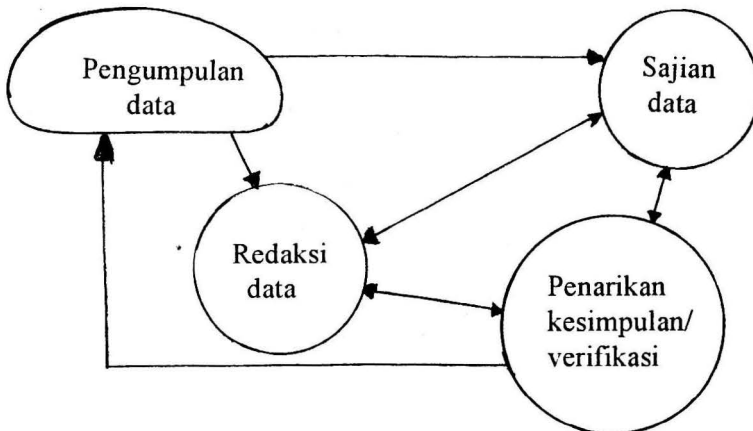
Untuk menguji validitas data dalam penelitian ini diperunakan teknik triangulasi. Triangulasi di atas dalam penelitian ini seperti yang disarankan oleh Patton (1980) dilakukan dengan cara: (1) membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dika-

takan informan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu itu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar belakang yang berlainan, dan (5) membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

### 7. Teknik Analisis

Dalam proses analisis terdapat tiga komponen utama yang benar-benar harus dipahami dan diperhatikan setiap peneliti, yaitu: reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sutopo, 1990). Sedangkan analisisnya menggunakan model analisis interaktif, artinya analisis ini dilakukan dalam bentuk interaktif dari ketiga komponen utama tersebut. Aktivitas interaktif dilakukan selama proses pengumpulan data, di mana peneliti membuat reduksi dan sajian data.

Setelah pengumpulan data selesai, maka peneliti mulai bergerak lagi di antara tiga komponen itu. Apabila peneliti merasa kurang mantap terhadap kesimpulannya, karena ada kekurangan dalam reduksi dan sajian data, maka peneliti dapat menggalinya dalam field note. Seandainya dalam *field note* tidak dapat ditemukan data yang dimaksud, maka peneliti harus mengadakan pengumpulan data lagi bagi pendalaman analisisnya. Proses analisis interaksi dapat ditunjukkan dalam bagan di bawah ini (Lihat Gambar 1). Perlu dijelaskan pula di sini, bahwa secara keseluruhan pola pemikiran studi ini bersifat *empirico inductive*, yang merupakan kebalikan dari pola pemikiran kuantitatif yang bersifat *hypothetico deductive* (Kirk and Miller, 1986).



Gb. 1. Model analisis interaktif (Sutopo, 1990).

## **F. Hasil**

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah naskah yang berisi deskripsi tentang disiplin di lingkungan masyarakat kota dan upaya pembinaan yang telah dilakukan selama ini. Deskripsi semacam ini penting artinya bagi pembinaan disiplin nasional dalam rangka pembinaan kebudayaan nasional.

## **G. Kerangka Laporan**

PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR PETA

DAFTAR GAMBAR/FOTO

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Masalah
- C. Tujuan
- D. Ruang Lingkup
- E. Metodologi
- F. Hasil
- G. Kerangka Laporan

BAB II. GAMBARAN UMUM KOTA DAN DAERAH PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Kota
- B. Gambaran Umum Daerah Penelitian
- C. Berbagai Permasalahan Kota

BAB III. DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN KELURAHAN

- A. Disiplin dalam Penanganan Limbah Keluarga.
- B. Disiplin dalam Partisipasi Masyarakat terhadap Kegiatan Sosial.
- C. Disiplin terhadap Administrasi Pemerintahan.
- D. Disiplin dalam Hubungan Ketetangaan.

BAB IV. DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DI KELURAHAN

- A. Disiplin di Lingkungan Pasar
- B. Disiplin di Lingkungan Terminal
- C. Disiplin di Lingkungan Tempat Hiburan
- D. Disiplin di Jalan Raya

**BAB V. UPAYA PEMBINAAN DISIPLIN PADA MASYARAKAT  
KOTA**

**A. Pembinaan Oleh Pemerintah**

**B. Pembinaan Oleh Tokoh Masyarakat.**

**BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN  
DAFTAR KEPUSTAKAAN  
LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

### **KOTA DAN DAERAH PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kota**

Kotamadia Daerah Tingkat II Surakarta termasuk wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang terletak antara  $110^{\circ}.45'.15''$  sampai  $110^{\circ}.45'.35''$  Bujur Timur, dan antara  $7^{\circ}.36'$  sampai dengan  $7^{\circ}.56'$  Lintang Selatan. Kota Surakarta atau terkenal juga dengan sebutan kota "SOLO" berada pada dataran rendah yang terletak pada ketinggian rata-rata lebih kurang 92 M di atas permukaan laut. Kota ini memiliki banyak sungai seperti: sungai Pepe, sungai Anyar, sungai Jemes dan sungai (bengawan) Solo. Secara administratif, batas-batas Kotamadia Daerah Tingkat II Surakarta adalah; (1) sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali; (2) sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar; (3) sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo; dan (4) sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.

Luas keseluruhan Kotamadia Surakarta adalah 4.404,0593 Ha, dengan panjang maksimal 10,30 km (Utara — Selatan), dan lebar maksimal 7,50 km (Barat — Timur). Sebagian besar terdiri dari tanah liat dengan pasir (Regosol Kelabu). Di sana-sini terdapat tanah padas dan di daerah bagian tengah serta sebelah timur terdiri dari endapan lumpur, karena dahulunya adalah daerah rawa. Secara garis besar, tanah di Kotamadia Surakarta ini terdiri dari tanah sawah seluas 181,642 Ha dan tanah kering (pekarangan, kebun/tegalan, kuburan, halaman, dan lain-lain) seluas 4222,417 Ha.

Daerah Surakarta termasuk daerah tropis (panas) dengan suhu udara maximum rata-rata  $34,08^{\circ}$  C, dan Minimum rata-rata  $21,0^{\circ}$  C tiap tahunnya. Rata-rata tekanan udara 1009,5 mbs, kelembaban udara rata-rata 74,83%, kecepatan angin rata-rata 10,5 knot, arah angin rata-rata 237,50, dan dengan curah hujan rata-rata antara 2000 sampai dengan 2500 milimeter per tahun.

Sebagai wilayah administratif, sejak kelahirannya status Kota Madia Daerah Tingkat II Surakarta telah mengalami 5 (lima) kali periode perubahan sebutan. Pertama, yaitu periode Pemerintah Daerah Kota Surakarta dari tanggal 16 Juni 1946 sampai dengan tanggal 5 Juni 1947. Kedua, yaitu periode Pemerintah Daerah Hamite Kota Surakarta dari tanggal 5 Juni 1947 sampai dengan tanggal 10 Juli 1948. Ketiga, yaitu periode Pemerintah Kota Besar Surakarta dari tanggal 10 Juli 1948 sampai dengan tanggal 18 Januari

1957. Keempat, yaitu periode Pemerintah daerah Kotapraja Surakarta, dari tanggal 18 Januari 1957 sampai dengan tanggal 1 September 1965. Kelima, yaitu periode Pemerintah Kotamadia Daerah Tingkat II Surakarta, dari tanggal 1 September 1965 sampai dengan sekarang ini.

Secara administratif Kotamadia Surakarta terbagi dalam 5 (lima) kecamatan, 51 Kelurahan, 562 RW dan 2515 RT. Kelima kecamatan tersebut adalah: Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjarsari.

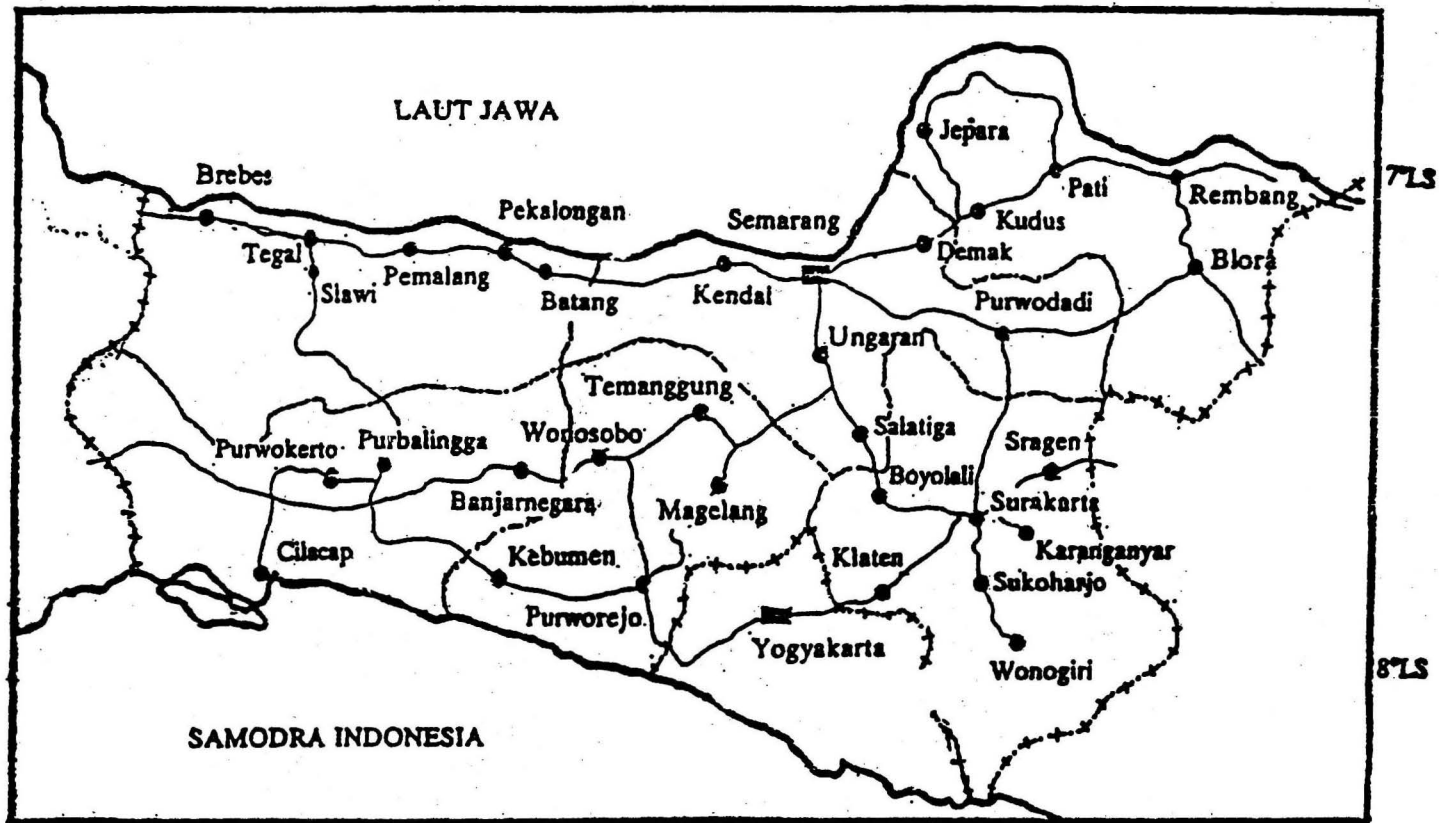
Keadaan penduduk di Kotamadia Surakarta bersifat heterogen dengan jumlah sampai dengan tahun 1990 (data statistik terakhir yang ada) sekitar 516.967 penduduk. Mobilitas penduduknya sangat tinggi. Banyak warga baru yang datang untuk berdomisili baik sementara maupun permanen, tetapi banyak juga warga Surakarta yang pergi ke luar daerah baik untuk sementara maupun permanen. Pada umumnya alasan dari kedatangan atau perpindahan mereka adalah untuk keperluan usaha (termasuk bekerja). dan sebagian lainnya untuk kepentingan studi. Sedikit sekali perpindahan yang dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan di luar itu.

Daerah Kodia Surakarta memiliki potensi ekonomi yang cukup baik dan bervariasi jika dibandingkan dengan daerah lain. Potensi ekonomi daerah tingkat II ini ditopang oleh: (1) Industri (besar dan kecil) seperti batik (Damar Hadi, Keris, Semar), kerajinan logam, kerajinan kayu, bahan makanan, (2) pasar-pasar besar seperti Pasar Gedhe, Pasar Legi, Pasar Kliwon, Pasar Nusukan, Pasar Singosaren, dan pertokoan-pertokoan besar, serta supermarket, (3) terminal besar (Terminal Gilingan), lapangan udara (Adi Sumarmo), biro-biro jasa, dan berbagai potensi obyek wisata budaya seperti Kraton Kasunanan dan Puri Mangkunegaran yang cukup mampu mendatangkan wisatawan baik wisatawan asing (mancanegara) maupun wisatawan nusantara (domestik).

Kotamadia Surakarta juga merupakan suatu pusat kebudayaan Jawa dengan budaya Kraton sebagai sentralnya, baik yang berujud dalam perilaku, falsafah hidup, cara bertindak, berbagai tata upacara, tata busana, dan sebagainya. Selama ini ada kesan, Solo seperti kota yang tertidur, kota yang sangat lamban untuk maju, pertumbuhan kebudayaannya nampak mandeg. Dan ketika Keraton Solo sebagai sentralnya budaya Jawa itu terbakar pada tanggal 31 Januari 1985, seakan-akan lengkaplah gambaran kemandegan tersebut. Tetapi itu tentu saja terjadi 8 — 10 tahun yang lalu. Kini Solo tidak hanya menggeliat bangun melainkan telah berdandan dan semakin memikat.

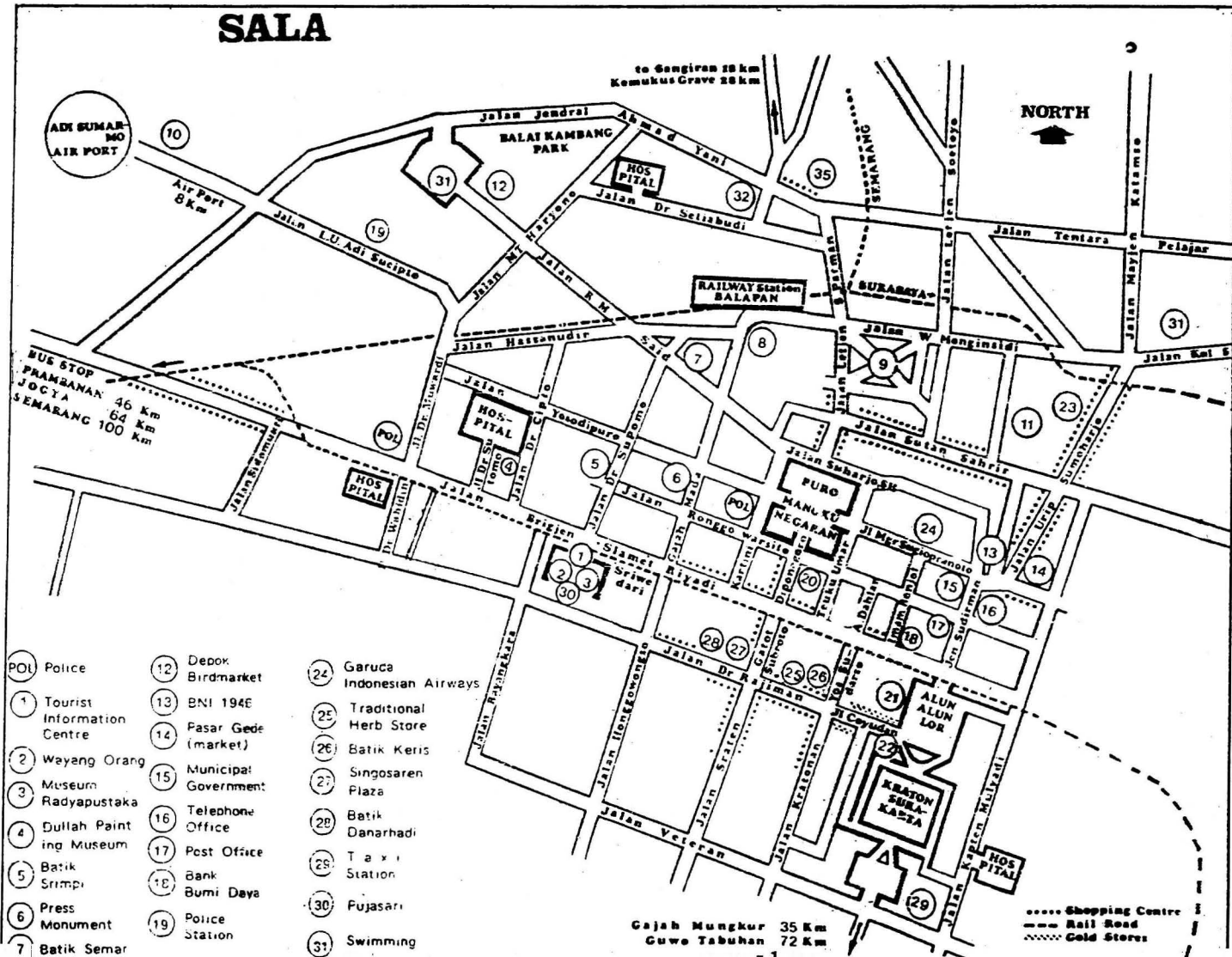
Sebagai bentuk kota modern, masyarakatnya akomodatif terhadap masuknya unsur-unsur baru. Justru dalam keadaan yang demikianlah,

PETA PROPINSI JAWA TENGAH





# SALA



- |                                |                           |                                |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| (POL) Police                   | (12) Depok Birdmarket     | (24) Garuda Indonesian Airways |
| (1) Tourist Information Centre | (13) BNI 194E             | (25) Traditional Herb Store    |
| (2) Wayang Orang               | (14) Pasar Gede (market)  | (26) Batik Keris               |
| (3) Museum Radyapustaka        | (15) Municipal Government | (27) Singosaren Plaza          |
| (4) Dullah Painting Museum     | (16) Telephone Office     | (28) Batik Danarhadi           |
| (5) Batik Srimpi               | (17) Post Office          | (29) Taxi Station              |
| (6) Press Monument             | (18) Bank Bumi Daya       | (30) Fujasari                  |
| (7) Batik Semarang             | (19) Police Station       | (31) Swimming                  |

Gajah Mungkur 35 Km  
Guwa Tabuhan 72 Km

..... Shopping Centre  
- - - - Rail Road  
..... Gold Stores

Kotamadia Surakarta menjadi sebuah kota yang maju dalam hal ini masyarakatnya mau mengadopsi unsur-unsur luar yang tidak merugikan, tetapi tanpa harus meninggalkan unsur-unsur miliknya sendiri.

Kebangkitan Solo dapat dikatakan berawal ketika tampilnya R. Hartomo menjadi Walikota Solo pada tahun 1985. Putra Solo yang terlahir 56 tahun yang lalu dengan pangkat terakhir kolonel, menggebrak dengan serangkaian langkah-langkah pragmatis. Keluarnya Instruksi Walikota Kepala Daerah Surakarta Nomor 660/8/3/1985 tentang Peningkatan Program Kota yang bersih, sehat, rapi, indah yang selanjutnya dikenal dengan istilah "SOLO BERSERI", pernah diragukan berbagai kalangan sebagai kebijakan yang tidak lebih dari sebuah slogan tanpa dihayati. Namun dengan terpilihnya Surakarta sebagai kota terbersih di Indonesia sehingga mendapatkan Duaja Adipura, telah membuktikan bahwa anggapan berbagai kalangan terhadap program Solo Berseri selama ini telah keliru.

## **B. Daerah Penelitian**

Lokasi utama penelitian ini adalah di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kotamadia Surakarta. Pemilihan kelurahan ini sebagai lokasi utama penelitian terutama sekali didasarkan atas pertimbangan karena terdapatnya (tersedianya) tempat-tempat atau fasilitas-fasilitas umum yang akan dijadikan sasaran (objek) penelitian, seperti: pasar umum dan pertokoan, terminal umum (besar), tempat hiburan (teatre), jalan raya yang padat lalu lintas (terdapat pertigaan, perempatan, dan rambu-rambu lalu lintas).

Selain itu, Kelurahan Gilingan mempunyai tingkat heteroginitas penduduknya yang cukup tinggi, baik dilihat dari: kewarganegaraan, pekerjaan, pendatang atau urban, agama, pengangguran, maupun jumlah rumah atau bangunan dan keanekaragaman bentuk fisiknya.

Menurut wilayah administratif, kelurahan Gilingan termasuk salah satu dari 13 (tiga belas) kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Banjarsari Kotamadia Surakarta. Kelurahan ini meliputi 7 pedukuhan, 21 RW, 109 RT, 5.012 KK, dengan jumlah penduduknya sebanyak 21.951 jiwa. Keadaan topografi daerahnya merupakan daerah dataran rendah, sedangkan letak astronomisnya, kelurahan Gilingan ini berada kira-kira sekitar 110.45' Bujur Timur dan 7.40' Lintang Selatan. Mempunyai ketinggian sampai dengan 100 meter di atas permukaan air laut, dengan curah hujan rata-rata antara 2000 sampai dengan 2500 milimeter per tahun.

Jarak kelurahan Gilingan ke Kantor Kecamatan Banjarsari sekitar 2 kilometer mengarah ke Selatan, dan jarak ke Kantor Kotamadia atau Balai Kota Surakarta sekitar 3 kilometer ke arah Selatan, sedangkan jarak ke Ibukota Propinsi Jawa Tengah sekitar 110 kilometer mengarah ke Utara.

Luas wilayah kelurahan seluruhnya adalah 127,200 hektar, yang meliputi pekarangan dan bangunan seluas 101.723 hektar, dan sisanya seluas 25.477 hektar meliputi sungai, jalan, kuburan, dan lain-lain.

## 1. Penduduk

### a. *Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan mobilitasnya*

Berdasarkan data bulan Desember tahun 1991/1992, jumlah keseluruhan penduduk di kelurahan Gilingan tercatat 22.032 jiwa (10.666 laki-laki dan 11.366 perempuan). Jumlah kepala keluarga (KK) ada 4.781; sehingga jumlah anggota per KK rata-rata ada 5 jiwa. Tentang komposisi penduduk secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel II.1.

Apabila dibandingkan dengan luas wilayah kelurahan secara keseluruhan, yaitu 127.200 Hektar, maka angka kepadatan penduduk kelurahan ini 17.320 jiwa per kilometer persegi. Angka ini cukup tinggi untuk ukuran rata-rata kepadatan penduduk Indonesia.

Data jumlah penduduk desa untuk tahun 1990/1991 adalah 21.951 (10637 laki-laki dan 11314 perempuan). Berdasarkan data penduduk antara tahun 1990/1991 dengan tahun 1991/1992 maka dapat dikemukakan bahwa angka laju pertumbuhan penduduk di kelurahan ini hanya 0,37% setahun. Suatu pertumbuhan penduduk yang sebenarnya tidak tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan umum rata-rata di Indonesia. Tentang komposisi penduduknya dilihat dari umur dan jenis kelaminnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II.1**  
**KOMPOSISI PENDUDUK**  
**DILIHAT DARI UMUR DAN JENIS KELAMIN**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 — 4	479	556	1.035
5 — 9	813	825	1.638
10 — 14	1.020	1.126	2.146
15 — 19	1.149	1.203	2.352
20 — 24	1.228	1.340	2.568
25 — 29	1.231	1.233	2.464
30 — 39	1.280	1.328	2.603
40 — 49	1.245	1.254	2.499
50 — 59	1.236	1.307	2.543
60 +	985	1.194	2.179
<b>Jumlah</b>	<b>10.666</b>	<b>11.366</b>	<b>22.032</b>

Sumber: Monografi Kelurahan Gilingan 1991.

PETA KL. GILINGAN

1 : 7500



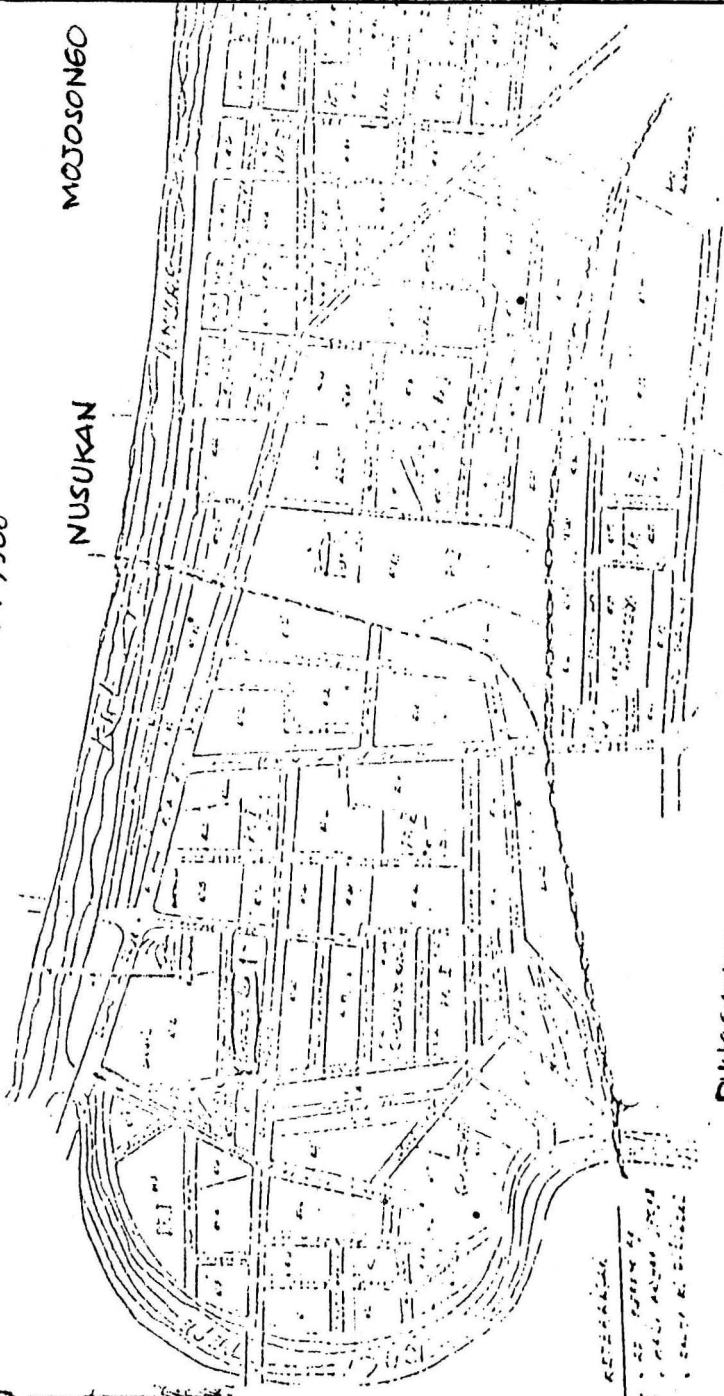
MOJOSONGO

MUSUKAN

PUNGGAWAN

KESTALAN

STABELAN



KETERANGAN  
1. 25 PAPAN ATAS  
2. 25 PAPAN BAWAH  
3. 25 PAPAN DUNGGAL

Mobilitas penduduk di Kelurahan Gilingan ini cukup tinggi. Agar lebih jelasnya dan terdapat kesepakatan, maka sebelum membicarakan tentang mobilitas penduduk lebih lanjut di Kelurahan Gilingan, perlu dikemukakan lebih dahulu di sini tentang apa yang dimaksud mobilitas penduduk itu. Menurut ilmu Kependudukan mobilitas penduduk dapat dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas tidak permanen atau sirkulasi. Mobilitas permanen maksudnya adalah pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dan tidak ada niat untuk kembali ke tempat semula. Sedangkan yang dimaksud mobilitas penduduk tidak permanen atau sirkulasi pada dasarnya adalah pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain tetapi ada niat untuk kembali ke tempat semula (asal). Dalam studi ini yang dimaksud mobilitas penduduk adalah dalam pengertian yang terakhir, yaitu mobilitas yang tidak diartikan sebagai perpindahan penduduk secara permanen atau perpindahan penduduk yang tidak mempunyai niat untuk kembali ke tempat asalnya.

Perpindahan penduduk dari luar daerah atau kelurahan lain ke kelurahan Gilingan yang paling menonjol adalah karena alasan "melaksanakan usaha" atau pekerjaan. Demikian pula perpindahan penduduk dari kelurahan Gilingan ke daerah atau kelurahan lain yang menonjol juga untuk keperluan yang sama, yaitu dalam rangka menjalankan usaha atau pekerjaan. Perbandingan antara yang keluar dan masuk di kelurahan ini seimbang. Pada data monografi kelurahan Gilingan bulan Juli 1992 (yang terbaru ketika studi ini dilaksanakan) tercatat pendatang sebesar 40 orang (22 orang pria dan 10 orang wanita), sedangkan yang pindah (keluar) sebesar 43 orang (23 orang pria dan 20 orang wanita). Jadi antara pendatang dan yang keluar dari Kelurahan Gilingan cukup seimbang. Dengan demikian dari segi ini, dinamika dan mobilitas penduduk kelurahan Gilingan dapat dikatakan cukup tinggi.

#### *b. Mata Pencarian dan Pendidikan*

Berdasarkan data monografi kelurahan Gilingan tahun 1991/1992, secara garis perbandingan jenis mata pencarian penduduknya dapat digambarkan, bahwa penduduk yang bermata pencarian sebagai buruh yang meliputi buruh industri dan buruh bangunan sebesar 51,37%; pegawai negeri sipil dan ABRI sebesar 8,75%; pengangkutan sebesar 8,70%; pedagang sebesar 8,17%; pensiunan sebesar 6,96%; pengusaha sebesar 4,72%; dan lain-lain sebesar 11,32%. Data yang lebih rinci lihat pada Tabel II.2 berikut ini.

**TABEL II.2**  
**PENDUDUK MENURUT JENIS MATA PENCAHARIAN 1991/1992**

Jenis mata pencaharian	Frekuensi	%
Pengusaha	675	4,72
Buruh Industri	3.629	25,40
Buruh Bangunan	3.711	25,97
Pedagang	1.167	8,17
Pengangkutan	1.244	8,70
Pegawai Negeri/ABRI	1.251	8,75
Pensiunan	995	6,96
Lain-lain	1.617	11,32
<b>Jumlah</b>	<b>14.289</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Monografi Kelurahan Gilingan 1991/1992.

Dari data pada tabel II.2 di atas menunjukkan bahwa lebih dari separo angkatan kerja di lokasi penelitian adalah para buruh industri dan bangunan. Buruh yang pertama sifat pekerjaannya lebih mantap, artinya tingkat kelangsungannya lebih panjang dan menetap, sedangkan buruh katagori kedua sifat pekerjaannya tidak mantap, artinya sewaktu-waktu dapat berhenti bekerja baik karena pekerjaannya yang sudah selesai atau karena tidak dipakai lagi dan lokasi pekerjaannya selalu berpindah-pindah.

**TABEL II.3**  
**PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN 1991/1992**

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	%
Tamat Akdm/Perg. T.	1.414	6,73
Tamat SLTA	2.932	13,96
Tamat SLTP	3.826	18,22
Tamat SD	3.821	18,20
Tidak Tamat SD	1.662	7,91
Belum Tamat SD	6.334	30,17
Tidak Sekolah	1.008	4,81
<b>Jumlah</b>	<b>20.997</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Monografi Kelurahan Gilingan 1991/1992.

Dari data pada tabel II.3 di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Kelurahan Gilingan telah mengenyam pendidikan, baik di

Sekolah Dasar maupun di tingkat yang lebih tinggi. Hanya ada 4,81 persen yang tidak sekolah. Untuk ukuran kota prosentase yang tidak sekolah ini cukup tinggi. Akan tetapi kalau kita lihat dari jenis mata pencaharian penduduk dan letak lokasinya yang termasuk daerah pinggiran dan merupakan daerah urban, maka angka tersebut wajar dan dapat dimaklumi.

**TABEL II.4**  
**JUMLAH GEDUNG SEKOLAH, GURU DAN MURID**  
**MENURUT JENIS SEKOLAHNYA TAHUN 1991**

Jenis Sekolah	Jumlah Gedung	Jumlah Guru	Jumlah Murid
TK	9	20	549
SD	11	101	2.679
SLTP	-	-	-
SLTA UMUM	2	135	2.494
SLTA Jejur	1	107	541
KURSUS-KURSUS	2	2	47
	25	505	6.310

Sumber : Monografi Kelurahan Gilingan, 1991.

Dari data pada tabel II.4 di atas, nampak bahwa sarana pendidikan yang ada di kelurahan Gilingan cukup bervariasi mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Hanya saja untuk SLTP baik umum maupun kejuruan di kelurahan Gilingan ini belum ada, sehingga anak-anak dari kelurahan Gilingan untuk bersekolah pada tingkat SLTP ke wilayah lain yang ada SLTP-nya, dan hal ini bukanlah masalah, karena selain lokasinya tidak jauh, sarana transportasi juga tidak sulit.

## 2. Latar Belakang Sosial Budaya

Seperti telah diuraikan di muka, secara umum Kotamadia Surakarta yang terkenal dengan sebutan "Solo" itu selain sebagai pusat perekonomian dengan berbagai fasilitasnya juga merupakan suatu pusat kebudayaan Jawa dengan budaya Kraton sebagai sentralnya, baik yang berujud perilaku, falsafah hidup, cara bertindak, berbagai tata upacara, tata busana, dan sebagainya. Itulah sebabnya kota ini juga sering dijuluki sebagai kota budaya, selain sebutan-sebutan yang lain seperti kota pariwisata, dan lain-lainnya.

Meskipun budaya Jawa yang bersentral pada budaya kraton dalam banyak hal masih nampak kental dalam kehidupan masyarakatnya, namun demikian sebagai bentuk kota modern, masyarakatnya akomodatif terhadap

masuknya unsur-unsur baru. Justru dalam keadaan yang demikianlah, Kotamadia Surakarta menjadi sebuah kota yang maju di mana masyarakatnya mau mengadopsi unsur-unsur luar yang tidak merugikan, tetapi tanpa harus meninggalkan unsur-unsur miliknya sendiri. Kelurahan Gilingan sebagai bagian integral dari Kodia Surakarta juga mempunyai latar sosial budaya yang tidak berbeda, terutama dalam hal bahasa Jawa.

Pengungkapan masalah bahasa di sini selain sebagai alat komunikasi yang paling efektif di dalam masyarakat, tetapi juga ada hubungannya dengan tata kelakuan di lingkungan pergaulan. Seperti diketahui dalam pemakaian bahasa Jawa perlu diperhatikan tingkat-tingkat penggunaannya. Bahasa sehari-hari penduduk di daerah penelitian, terutama dalam suasana yang tidak resmi, adalah bahasa *Jawa ngoko*. Bahasa ini banyak dipakai (diucapkan) oleh orang-orang yang sepadan umurnya, atau sesama teman yang sudah akrab.

Selain bahasa Jawa ngoko, sebagai komunikasi digunakan juga bahasa Jawa krama. Bahasa Jawa krama ini ada tingkat-tingkatnya seperti *krama andhap*, *krama madya*, dan *krama hinggil*. Penggunaannya sangat tergantung pada siapa yang dihadapi. Semakin dihormati yang diajak bicara, semakin lembut tutur kata dan semakin sopan tingkah lakunya. Bila seseorang menegur atau ditegur orang yang belum dikenal baik atau baru dikenal, praktis akan menggunakan bahasa Jawa krama, sebagai penghormatan. Apabila seseorang menghadapi orang yang amat dihormati maka otomatis akan menggunakan bahasa Jawa krama hinggil. Jelasnya dengan bahasa yang dipakai, apalagi dilengkapi dengan tutur kata dan sikap serta tingkah lakunya, maka akan dapat diketahui tingkat pergaulan mereka, atau siapa yang menghormati atau dihormati. Bahasa Indonesia pada umumnya digunakan pada pertemuan-pertemuan formal, tetapi dalam sarasehan atau pertemuan di tingkat RT-RW masih sering juga menggunakan bahasa Jawa.

Untuk dapat melihat secara jelas serta menghayati peranan dalam tata kelakuan kehidupan masyarakat, selain apa yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dilihat pula dari sistem kemasyarakatannya melalui kesatuan kekerabatan yang ada, stratifikasi sosial dan komunitasnya.

### *Kesatuan Kekerabatan*

Istilah kesatuan kekerabatan, dalam ilmu antropologi sering disebut sebagai kelompok kekerabatan atau *kingroup* yang diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan manusia yang terikat oleh unsur-unsur tertentu, terutama ikatan kekerabatan, baik karena hubungan darah (keturunan) maupun karena hubungan perkawinan.

Dalam kehidupan masyarakat, bentuk *kingroup* yang pertama-tama



dapat dilihat adalah keluarga inti atau *nuclear family*. Suatu keluarga inti biasanya anggotanya terdiri dari seorang suami, seorang istri, dan anak-anak mereka yang belum berumah tangga. Anak tiri dan anak angkat yang secara resmi mempunyai hak wewenang yang kurang lebih sama dengan anak sesungguhnya, dapat dianggap sebagai anggota keluarga inti (Koentjaraningrat, 1981).

Fungsi keluarga inti yang menonjol di kelurahan tempat penelitian ini adalah merupakan kelompok sosial yang menjalankan ekonomi rumah tangga sebagai kesatuan, sekalipun ada juga yang hanya menumpang dan ikut makan pada keluarga inti yang lain, misalnya keluarga inti yunior (anak) menumpang pada keluarga inti senior (orang tua).

Selain keluarga inti terdapat pula keluarga luas atau *extended family*, yaitu salah satu bentuk kesatuan kekerabatan yang ikatan hubungan kekerabatannya diperhitungkan melalui satu tokoh atau satu keluarga yang masih hidup sebagai pusat perhitungan, atau berprinsip *ego oriented kinship*. Salah satu ciri keluarga luas adalah selalu terdiri dari satu keluarga inti, tetapi semuanya merupakan satu kesatuan sosial yang amat erat dan biasanya hidup tinggal bersama dalam satu tempat tinggal (rumah), atau pada satu pekarangan (Koentjaraningrat, 1981).

Kelompok kerabat di luar keluarga inti tersebut, sering disebut juga dengan istilah sanak sedulur, yaitu semua orang yang masih ada hubungan kerabat dengan ego. Namun demikian harus pula dibedakan antara *sedulur cedhak* (saudara dekat) dan *sedulur adoh* (saudara jauh). Saudara dekat adalah mereka yang termasuk di dalam hubungan kekerabatan dua tingkat ke atas dan dua tingkat ke bawah dari ego.

Dalam sistem kekerabatan seperti tersebut di atas, dikenal istilah-istilah kekerabatan yang diklasifikasikan berdasarkan generasi (keturunan) yang berjumlah sepuluh generasi ke atas dan sepuluh generasi ke bawah.

Istilah-istilah tersebut yaitu:

- a. Generasi ke atas meliputi: wong tuwa (orang tua), embah, buyut (embah buyut), canggah (embah canggah), wareng, udeg-udeg, gantung siwur, gropak sente, debog bosok dan galih asem.
- b. Generasi ke bawah meliputi: anak, putu (wayah/cucu), buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, gropak sente, debog bosok dan galih asem.

Kedua generasi tersebut, mengenal beberapa istilah kekerabatan untuk menyebutkan seseorang di dalam kelompok kerabatnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti:

- a. Istilah simbah, embah, pak tuwa, kakek diberikan untuk menyebut orang tua laki-laki ayah atau ibu (ayah ayah/ibu).

- b. Istilah simbah, embah, mbok tuwa, nenek, mbah wedok, diberikan untuk memanggil orang tua perempuan ayah atau ibu (ibu ayah/ibu).
- c. Istilah ipe, untuk menyebut adik, kakak laki-laki/perempuan dari istri/suaminya.
- d. Istilah Peripean, untuk menyebut hubungan antara saudara laki-laki/perempuan dengan saudara laki-laki/perempuan dari istri atau suaminya.
- e. Istilah de atau uwa, untuk menyebut kakak laki-laki maupun perempuan ayah atau ibu.
- f. Istilah Lik, untuk menyebut adik laki-laki maupun perempuan ayah maupun ibu.

Adat menetap sesudah menikah yang berlaku dilokasi penelitian ini pada umumnya adalah adat utrolokal, yaitu adat yang memberikan kebebasan kepada pengantin baru untuk menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat suami atau istri menurut situasi dan kondisi kemampuan keluarganya. Setelah menikah, maka biasanya mempelai tinggal di rumah orang tua baik wanita maupun laki-laki untuk sementara waktu, sebelum mereka mampu membangun rumah sendiri. Oleh karena itu, bentuk keluarga luas yang terjadi pada umumnya adalah *keluarga luas utrolokal*, yang terdiri dari satu keluarga inti senior (orang tua) dengan keluarga inti dari anaknya. Bentuk keluarga luas semacam ini pada umumnya sifatnya hanya sementara, artinya pada suatu saat keluarga inti baru itu akan memisahkan diri jika sudah mampu atau karena kepentingan lain.

Sistem kekerabatan yang ada di Kota Madia Daerah Tingkat II Surakarta, tidak berbeda dengan daerah-daerah di Jawa yang lain pada umumnya. Kaum kerabat disebut *sedulur* dalam bahasa Jawa. Pada dasarnya sistem kekerabatan orang Jawa adalah bilateral, yaitu prinsip yang menghubungkan kekerabatan melalui orang laki-laki dan orang perempuan. Rumah tangga dalam keluarga batih (sumah) terdiri dari suami istri dan anak-anaknya yang belum kawin, atau mungkin ditambah dengan saudara-saudara dari pihak istri, pihak suami atau suami serta istri dari anak-anaknya. Biasanya mereka memasak dalam satu dapur, atau dengan kata lain urusan ekonomi rumah tangga ditanggung secara bersama-sama dan diorganisir oleh kepala rumah tangganya.

Ayah (suami) bertindak sebagai kepala rumah tangga, tetapi bersama ibu (istri) sama-sama mengemudikan jalannya rumah tangga dan saling mempunyai tanggung jawab sesuai dengan hak serta kewajiban yang dibebankan kepada mereka masing-masing. Mereka (suami-istri, ayah - ibu)

juga mengelola harta benda, baik harta benda bawaan maupun harta benda yang diperoleh setelah mereka menikah atau harta pendapatan bersama-sama.

Peranan ayah yang khusus terjadi dalam perkawinan anak gadisnya. Untuk sahnya perkawinan seorang anak perempuan menjadi istri harus ditunjuk seorang wali yang biasanya dilakukan oleh ayah kandungnya. Bila ayah kandungnya telah meninggal dunia, maka sebagai gantinya haruslah salah seorang anak laki-laki ayahnya yang tertua. Bila tidak ada, dapat dilakukan oleh saudara laki-laki ayahnya, yang biasanya disebut "pancer wali". Dengan demikian wali harus seorang laki-laki dari kerabat ayahnya (suami). Namun status sebagai kepala somah tidak selalu diduduki oleh ayah (suami). Bila terjadi beberapa sebab misalnya suami bekerja di perantaraan, maka kepala somah diperankan oleh ibu (istri). Lain halnya bila ayah (suami) meninggal dan mempunyai anak laki-laki yang sudah dewasa, maka status kepala somah dipegang oleh anak laki-laki tersebut.

### *Stratifikasi Sosial*

Stratifikasi sosial adalah suatu sistem pelapisan masyarakat yang berstruktur. Tentang pelapisan sosial ini, di lokasi penelitian memang ada tetapi tidak begitu tajam. Unsur yang membedakan lapisan-lapisan sosial tersebut bermacam-macam, misalnya keturunan bangsawan, pemegang kekuasaan, juga pendidikan. Prinsip keturunan bangsawan di sini terutama dipengaruhi oleh sistem kraton Jawa. Lapisan bangsawan dianggap menduduki status yang cukup tinggi sehingga dihormati (tetapi di lokasi penelitian, kelompok ini sedikit sekali, hanya satu dua).

Pemegang kekuasaan yang dimaksudkan di sini adalah para pemimpin formal dan informal. Dalam kehidupan sehari-hari kelompok ini beserta keluarganya, sekalipun bukan merupakan lapisan sosial yang resmi, tetapi oleh penduduk dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi dan disegani dalam pergaulan.

Di lokasi penelitian, kepandaian dalam ilmu juga dianggap sebagai alasan untuk mendapat kedudukan yang tinggi. Dengan demikian golongan orang-orang pandai dan keluarganya (misalnya guru, dosen, pemuka agama, pegawai negeri, dan lain-lain) dianggap menduduki lapisan sosial yang cukup tinggi, karena mereka mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam prakteknya bisa saja terjadi kombinasi antara keturunan bangsawan, pemegang kekuasaan dan pendidikan, bahkan sering dikaitkan pula dengan kekayaan harta benda.

## *Komunitas*

Komunitas adalah kesatuan hidup setempat di mana setiap warga merasa terikat pada suatu tempat. Di sini secara khusus membicarakan suatu komunitas kecil yaitu kelurahan, yang di antara warganya biasanya saling kenal-mengenal. Bentuk kelurahan yang menjadi lokasi penelitian ini merupakan unit administrasi pemerintahan di bawah kecamatan. Terdiri dari unit-unit pemukiman yang disebut dukuh. Aktivitas yang menyangkut kehidupan masyarakatnya antara lain meliputi gotong royong baik untuk kepentingan bersama maupun kepentingan pribadi secara bergiliran seperti kegiatan bersama yang bersangkutan paut dengan kematian, kerja bakti, kegiatan upacara adat bersih desa, dan lain-lain.

Dalam komunitas kelurahan, struktur kelurahannya diurus oleh perangkat kelurahan yang terdiri dari kepala kelurahan, kepala bagian umum, kepala bagian sosial, kepala bagian agama, kepala bagian keamanan, dan pembantu-pembantu lainnya yang langsung di bawah kecamatan dan membawahi pedukuhan-pedukuhan.

### **C. Berbagai Permasalahan Kota**

Pada hakekatnya ada beberapa faktor utama yang menyebabkan perkembangan sebuah kota pada umumnya, yaitu penambahan penduduk alami maupun karena urbanisasi (migrasi desa-kota) yang relatif cepat, dan perkembangan aktivitas dunia usaha serta perubahan kehidupan penduduk yang juga relatif cepat. Semuanya itu membutuhkan berbagai fasilitas dan sarana pelayanan, seperti perumahan, pelayanan sosial, angkutan (transportasi), air bersih, dan pelayanan-pelayanan sosial lainnya. Akan tetapi dengan segala keterbatasannya yang ada, keadaan seperti itu justru menimbulkan permasalahan perkotaan pada umumnya.

Kota dengan penduduk yang relatif padat tetapi dengan luas daerah yang relatif terbatas, cenderung tumbuh dan berkembang lebih cepat dari daerah sekelilingnya, sehingga lebih menarik bagi pendatang dari luar kota serta mendorong arus urbanisasi yang selalu menimbulkan permasalahan. Gejala pertumbuhan dan pemekaran wilayah kota yang lebih cepat ternyata telah menimbulkan berbagai benturan nilai-nilai sosial, sehingga memerlukan sistem administratif, wewenang, yurisdiksi dan dinamisasi yang berbeda dengan wilayah non perkotaan.

Kota yang mempunyai daya tarik lebih besar akan memperbesar tingkat pertumbuhan jumlah penduduknya, sehingga mengakibatkan semakin membengkaknya tuntutan kebutuhan di segala bidang kehidupan. Membengkaknya tuntutan kebutuhan hidup ini juga disebabkan oleh belum

sesuainya nilai-nilai dengan persyaratan norma kehidupan perkotaan, yang terus berjalan secara berantai. Karena terpenuhinya kebutuhan yang satu akan muncul kebutuhan-kebutuhan baru, seiring dengan derasnya arus urbanisasi.

Pertambahan penduduk yang tinggi (secara alami maupun urbanisasi) dan kurangnya berbagai prasarana dan sarana kehidupan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan di daerah perkotaan. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi di kota besar di Indonesia antara lain adalah masalah pencemaran lingkungan sebagai akibat pengelolaan limbah yang kurang benar, masalah transportasi, masalah kesempatan kerja (pengangguran), masalah pemukiman yang kurang memenuhi persyaratan hidup (gubuk-gubuk liar), masalah PKL (pedagang kaki lima), pedagang asongan, kemacetan lalu lintas dan berbagai masalah sosial kemasyarakatan seperti kriminalitas, tuna wisma, dan masalah tuna susila.

Ketatnya persaingan masyarakat untuk mendapatkan prasarana dan sarana kehidupan, tidak jarang orang kurang memperhatikan orang lain (individualistis) demi untuk pemenuhan kebutuhan pribadinya. Sehubungan dengan hal itu, kurangnya pemahaman sejumlah warga kota terhadap lingkungannya di mana mereka tinggal, juga mempunyai andil yang cukup besar terhadap munculnya berbagai permasalahan di perkotaan. Selain itu sejumlah warga kota yang masih bersikap dan berperilaku seperti di daerah asalnya, juga ikut menambah kompleksitas permasalahan perkotaan.

Munculnya permasalahan di daerah perkotaan tersebut antara lain sangat dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan warga kota dalam mentaati segala peraturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Seperti telah disinggung di muka, bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki aturan-aturan, kaidah-kaidah sosial, dan pengendalian sosial tertentu untuk menjaga keberlangsungan kelompoknya itu. Demikian pula halnya dengan kelompok masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Sehubungan dengan itu pula, untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat perlu adanya pembinaan disiplin terhadap warga masyarakat yang bersangkutan.

Dalam kehidupan sehari-hari berbagai permasalahan muncul diperkotaan. Perpaduan antara kurang memudahinya prasarana dan sarana kehidupan, dengan kurangnya pemahaman warga kota terhadap tata aturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku di perkotaan diduga menyebabkan kurang disiplin warga masyarakatnya. Tetapi banyak variabel lain yang secara langsung atau tidak juga ikut berpengaruh terhadap masalah disiplin masyarakat ini. Untuk keperluan itulah, maka penelitian ini dilakukan.

## **Bab III**

### **DISIPLIN MASYAKAT**

#### **DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN KELURAHAN**

##### **A. Disiplin dalam Penanganan Limbah Keluarga**

Sampah merupakan masalah yang cukup memusingkan yang lazim dihadapi oleh wilayah perkotaan. Pemerintah daerah pada umumnya dihadapkan pada problem produksi limbah yang berlebihan sehingga menyulitkan pembuangannya. Produksi sampah yang berlebihan menuntut penanganan serius jika sebuah kota ingin tampil indah, bersih, dan rapi. Ini berarti pemerintah daerah harus terus meningkatkan kapasitas daya angkut armada sampah yang tersedia.

Dalam beberapa hal, penanganan masalah limbah (sampah) ini sangat pelik. Jika kurang hati-hati dalam penanganannya justru akan menimbulkan masalah lain yang lebih sulit. Karena masalah armada dapat tertangani misalnya, masih harus memikirkan tempat pembuangan akhir yang representatif. Sebab penumpukan sampah pada umumnya akan menimbulkan bau busuk yang jelas tidak disukai oleh masyarakat. Ini berarti harus dicari tempat yang cukup jauh dari pemukiman penduduk. Kalau tidak akan menimbulkan kerawanan sosial, protes masyarakat jelas sulit dihindari. Inilah tantangan yang harus dihadapi oleh setiap pemerintah daerah, termasuk pemerintah daerah Kodia Surakarta, jika menginginkan wilayah perkotaan yang bersih, sehat, rapi, dan indah.

Untuk keperluan tersebut pemerintah Kota Madia Daerah Tingkat II Surakarta sudah cukup lama secara bertahap telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka menangani masalah K3 (kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota). Dengan diperolehnya dan dipertahankannya Adipura yang merupakan penghargaan tertinggi dari Presiden di bidang kebersihan perkotaan, membuktikan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Madia Daerah Tingkat II Surakarta ini tidak sia-sia. Hal ini juga menunjukkan bagaimana respon dari masyarakat yang cukup positif. Partisipasi masyarakat Surakarta sungguh dapat dibanggakan. Selanjutnya tinggal bagaimana pembinaannya saja. Sebab tidak jarang jika hanya puas setelah mencapai prestasi puncak saja, selanjutnya mengendor lagi.

Perlu disadari pula bahwa tidaklah mudah mengubah kebiasaan hidup suatu masyarakat. Hal itu sangat membutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Upaya membangun sarana fisik yang menunjang kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota barangkali memang mudah, tetapi membudayakan hidup bersih dan sehat serta tertib itu memerlukan waktu. Namun demikian, me-

lalui upaya yang terus menerus, seperti penyuluhan, lomba, pemberian contoh hidup bersih dan sehat, memberikan proyek-proyek percontohan dan lain-lainnya, kini budaya untuk hidup bersih dan sehat serta tertib nampaknya mulai terwujud menjadi kenyataan.

Upaya memasyarakatkan program Solo BERSERI di Kota Madia Daerah Tingkat II Surakarta telah berhasil menumbuhkan partisipasi masyarakat yang positif dan tinggi. Kegiatan penyuluhan terus menerus yang dilakukan oleh Tim kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota yang terdiri dari Ibu-ibu PKK di tiap kelurahan (khususnya di kelurahan Gilingan), kini telah menunjukkan hasilnya. Kecuali munculnya taman-taman hasil swadaya masyarakat, kini hampir setiap RT di seluruh kelurahan yang ada di Kota Madia Daerah Tingkat II Surakarta telah mempunyai paguyuban atau kelompok-kelompok yang bergerak dalam bidang kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota.

Paguyuban atau kelompok-kelompok tersebut secara swadaya merumuskan permasalahan bidang kebersihan, keindahan, dan ketertiban di lingkungannya sendiri-sendiri, serta berusaha untuk memecahkan permasalahan tersebut juga secara swadaya. Melalui wadah baru tersebut program Solo BERSERI makin membudaya dan diharapkan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Apabila keadaan seperti ini benar-benar terlaksana, maka bentuk partisipasi masyarakatnya tidak lagi bersifat dimobilisasikan tetapi telah menjadi partisipasi yang bersifat otonom atau swakarsa.

Paguyuban-paguyuban yang bergerak di bidang kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota di setiap RT tersebut menjadi ajang kegiatan warga dalam ikut serta menyukseskan program Solo BERSERI. Dengan munculnya paguyuban-paguyuban dalam bidang kebersihan, keindahan dan ketertiban kota di tingkat RT, berarti masalah kebersihan, keindahan dan ketertiban kota kini bukan lagi semata-mata merupakan program pemerintah, tetapi telah menjadi gerakan masyarakat yang memiliki akar. Campur tangan aparat pemerintah dalam bidang kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota makin berkurang, karena pada umumnya telah diprakarsai oleh masyarakat sendiri.

Perubahan dari "program pemerintah" menjadi "gerakan masyarakat" telah lebih mengefektifkan sasaran terwujudnya wilayah Kota Madia Daerah Tingkat II Surakarta yang bersih, sehat, rapi, indah (Berseri), seperti telah menjadi tekad pemerintah Kota Madia Daerah Tingkat II Surakarta sejak dicanangkannya slogan "Surakarta berseri" atau "Solo Berseri". Apalagi telah tersedia juga perangkat hukum yang mendukung ter-



wujudnya kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota, yaitu peraturan daerah (perda) tentang sampah. Meskipun belum sepenuhnya dilaksanakan, khususnya untuk daerah-daerah pinggiran, namun setidaknya Peraturan Daerah tersebut telah ikut merekayasa tertib sosial masyarakat dalam bidang kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota.

Beberapa warga Kelurahan Gilingan ketika diwawancarai mengenai manfaat program pemerintah seperti program Solo BERSERI, menyatakan bahwa mereka sebagai warga masyarakat benar-benar merasakan maksud baik pemerintah dalam program-program atau kebijakan-kebijakannya. Manfaatnya sudah mereka rasakan, dalam hal sekarang kebersihan lingkungannya meningkat, lalu lintas menjadi lancar, dan menambah keindahan lingkungan kota. Mereka juga mengakui bahwa dukungan masyarakat itu mutlak perlu, dan partisipasi masyarakat yang telah ada serta berjalan sekarang ini masih perlu terus ditingkatkan.

Dalam rangka penanganan limbah keluarga, setiap penduduk menyediakan tempat sampah berupa tong-tong sampah atau keranjang-keranjang sampah di depan rumahnya. Tempat sampah tersebut pada umumnya beragam, terutama karena kesepakatan tiap RT. Sedangkan untuk membuangnya ke tempat bak penampungan sampah besar yang diangkut oleh mobil sampah yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, sudah ada petugas khusus. Petugas khusus tersebut di kelurahan Gilingan terdapat dua-puluh satu armada sampah yang mengambil sampah dari rumah ke rumah dan di bawa ke tempat pembuangan sampah besar yang ditarik mobil sampah.

Untuk kelancaran proses pembuangan sampah dari rumah ke rumah menuju pembuangan umum tersebut, maka setiap kepala keluarga ditarik restribusi kebersihan kota rata-rata sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) dikatakan rata-rata karena dalam prakteknya di lapangan (di lokasi penelitian) besarnya restribusi ini untuk masing-masing keluarga dibeda-bedakan. Besarnya pembedaan ini masing-masing RT tidaklah sama, yang pasti semua itu berdasarkan kesepakatan melalui musyawarah di dalam rapat tingkat RT. Pembedaan ini dilakukan antara lain didasari oleh pertimbangan kemampuan yang tidak sama dan adanya kesepakatan untuk membebaskan iuran itu bagi keluarga-keluarga tertentu yang tidak mampu. Untuk seluruh kelurahan misalnya terdapat 187 keluarga yang dibebaskan dari iuran restribusi sampah tersebut.

Dari pemasukan restribusi itu kemudian dipilah-pilahkan ke dalam beberapa pos dengan pembagian: 50% untuk Pemerintah Daerah Kota Madia Surakarta, 45% untuk LKMD, dan 5% untuk PKK. Tentang masalah kelancaran pembayaran restribusi sampah ini menurut pengakuan



Pak Lurahnya, Kelurahan Gilingan ini paling lancar untuk seluruh Kota Madia Surakarta. Bahkan tidak hanya itu untuk iuran PBB juga lancar.

Selain masalah kebersihan limbah keluarga yang penanganannya seperti telah digambarkan di muka, maka dalam rangka kebersihan lingkungan, masyarakat Gilingan juga sering melakukan gerakan kebersihan bersama dalam bentuk kerja bakti. Gerakan kebersihan secara gotong royong yang dilakukan secara periodik berdasarkan kesepakatan bersama ini nampaknya juga berhasil dengan baik. Hal ini nampak dari kebersihan lingkungan masing-masing yang dapat dilihat di setiap gang yang ada.

Gerakan kebersihan baik dalam penanganan limbah keluarga maupun lingkungan di kelurahan Gilingan jelas menunjukkan keberhasilannya. Diraihnya Juara I pada tahun 1989, 1990, dan 1991 dalam lomba Kebersihan Lingkungan dalam rangka Solo Berseri untuk seluruh kelurahan di Surakarta membuktikan akan hal tersebut. Meskipun demikian diakui bahwa masalah kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota itu adalah masalah yang tidak berhenti pada sekedar juara dan lomba saja, melainkan hal yang harus dilakukan terus menerus. Dan diakui bahwa hal itu justru akan menjadi berat kalau kesadaran dari masyarakatnya kurang.

Diakui juga bahwa masih ada lokasi tertentu di wilayah kelurahannya yang kesadaran untuk masalah kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota belum tinggi. Dengan demikian secara keseluruhan, pembinaan tentang penanganan limbah keluarga dan lingkungan harus terus dilakukan. Sementara itu, masalah upaya pembinaan tersebut selama ini telah dilakukan, baik melalui sarasehan, paguyuban tentang kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota di tingkat RT, maupun melalui pertemuan-pertemuan di tingkat RW, dukuh, dan kelurahan.

Menurut Pak Lurah, dan diperkuat oleh perangkat kelurahan, dikatakan bahwa biasanya Walikota Surakarta tiap 35 hari sekali mengadakan sarasehan dan temu muka dengan masyarakat umum, dari satu kelurahan ke kelurahan yang lain secara bergantian. Dalam kesempatan itu aspirasi masyarakat secara langsung ditampung sebagai bahan masukan guna membantu pembuatan kebijakan-kebijakan maupun perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan yang telah berjalan selama ini.

## **B. Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Sosial**

Partisipasi adalah istilah pembangunan yang menjadi sangat populer semenjak Orde Baru, terutama sejak Pelita I tahun 1969 (Gultom, 1985). Istilah partisipasi cukup luas dipakai di kalangan masyarakat, sehingga hampir di berbagai organisasi, perkumpulan, atau kegiatan, selalu muncul kata-kata berpartisipasi.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1988 telah menegaskan bahwa berhasilnya pembangunan sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia. Dari uraian yang tercantum dalam GBHN tersebut, ternyata ada kaitan antara lahirnya partisipasi dengan lahirnya sikap mental.

Mendasarkan pemahaman terhadap istilah tersebut di atas, maka pengertian partisipasi yang berasal dari bahasa asing berbentuk kata kerja (Latin: *participare*) adalah peran serta atau menjadi terlibat (Hornby, 1989). Dengan menggunakan kata "partisipasi" dalam arti seperti tersebut itu, kita disadarkan bahwa suatu kegiatan dalam partisipasi itu merupakan kegiatan usaha bersama.

Sebagai usaha bersama, berarti bahwa orang yang terlibat dalam kegiatan partisipasi tidak boleh menjadi penonton, membiarkan orang lain bekerja sendiri, tetapi harus memiliki artian sebagai partner untuk kerjasama. Dengan demikian, kata partisipasi mengandung pula semangat demokrasi, bersifat terangsang positif, dan sukarela. Sukarela berarti ikut serta dengan keikhlasan, bukan karena paksaan.

Partisipasi dapat dibedakan menjadi dua, yakni partisipasi yang bersifat swakarsa dan partisipasi yang bersifat dimobilisasikan. Partisipasi swakarsa mengandung arti bahwa keikutsertaan dan berperansertanya atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri. Sementara partisipasi yang dimobilisasikan memiliki arti bahwa keikutsertaan atau berperansertanya seseorang atas pengarahannya orang lain (Gultom, 1985).

Partisipasi mengandung nilai dan strategi. Sebagai suatu nilai, partisipasi bukan sekedar sarana untuk mencapai tujuan, melainkan juga merupakan tujuan. Partisipasi sebagai suatu nilai merupakan tumpuan demokrasi dan sekaligus merupakan jaminan berfungsinya demokrasi itu. Partisipasi mengisyaratkan kerjasama dengan banyak pihak, dan di dalam kerjasama itu orang mengaktualisasikan diri dengan merealisasikan segenap dan sebatas kemampuannya. Sedang berdasarkan pengertian partisipasi sebagai strategi, berpartisipasi berarti turut menentukan arah dan cara pencapaian sesuatu tujuan.

Pengalaman budaya seseorang yang merupakan akumulasi hasil interaksi dengan lingkungan hidupnya setiap hari dalam masyarakat, lokasi geografi, dan tradisi pemeliharaan hidupnya, sangat mempengaruhi dan menentukan partisipasi masyarakat tersebut terhadap kegiatan yang ditemuinya (Sutopo, 1989). Partisipasi digunakan untuk mencapai tujuan dan juga merupakan tujuan. Sebenarnya partisipasi juga merupakan pengalaman

budaya, yaitu budaya demokrasi dan berfungsi demokrasi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat terhadap kegiatan Sosial di Lingkungannya akan tergantung pada akumulasi hasil interaksi antara masyarakat dengan Kegiatan Sosial tersebut.

Kalau partisipasi berarti keikutsertaan mengambil bagian, maka berarti partisipasi masyarakat terhadap kegiatan Sosial adalah keikutsertaan masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan yang disebut Kegiatan Sosial.

Partisipasi yang baik ialah partisipasi yang mendukung suksesnya usaha bersama. Dalam hal ini, juga berarti suksesnya Kegiatan Sosial. Beberapa sifat atau kualifikasi partisipasi dapat kita sebut antara lain: positif, kreatif, kritis, korektif-konstruktif, dan realistis. Partisipasi dikatakan positif apabila partisipasi itu mendukung kelancaran usaha bersama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sebaliknya partisipasi menjadi negatif, apabila menjadi beban, menjadi penghalang, atau memperlambat lajunya kegiatan atau usaha bersama.

Partisipasi yang kreatif berarti keterlibatan yang berdaya cipta, tidak hanya ikut begitu saja suatu kegiatan yang direncanakan pihak lain, tidak hanya melaksanakan instruksi atasan, melainkan memikirkan sesuatu yang baru. Kreasi diwujudkan berupa gagasan-gagasan baru, dapat berupa metode, teknik baru, cara baru yang lebih efektif dan efisien, yang semuanya mengantar ke arah suksesnya usaha bersama itu.

Partisipasi dapat dikatakan kritis-korektif-konstruktif apabila keterlibatan dilakukan dengan mengkaji suatu jenis atau bentuk kegiatan, menunjukkan kekurangan atau kesalahan, dan memberikan alternatif yang lebih baik. Dengan partisipasi yang kritis-korektif-konstruktif, bukan saja proses usaha bersama lebih lancar, tetapi juga akibat-akibat negatif dapat dicegah. Sifat kritis-korektif-konstruktif dari suatu partisipasi sangat berguna untuk menjaga agar perencanaan dan pelaksanaan suatu usaha bersama benar-benar baik dan dapat mencapai tujuan.

Partisipasi yang realistis mempunyai arti bahwa keikutsertaan seseorang dengan memperhitungkan realitas atau kenyataan, baik kenyataan dalam masyarakat maupun realitas mengenai kemampuannya, waktu yang tersedia, dan adanya kesempatan dan ketrampilan (Gultom, 1985). Berdasarkan pengertian di atas, maka sifat partisipasi tersebut merupakan nilai-nilai budaya yang hidup dan dapat dikembangkan dalam usaha mencapai tujuan bersama.

Secara fungsional, nilai-nilai budaya itu mendorong individu untuk berperilaku seperti apa yang ditentukan, mereka percaya bahwa hanya dengan perilaku seperti itu, mereka akan berhasil dalam kehidupannya. Jadi

nilai-nilai budaya itu menjadi pedoman kehidupan dan melekat erat secara emosional pada diri seseorang atau masyarakat dan merupakan tujuan hidup yang diperjuangkan (Usman Pelly, 1991).

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, maka partisipasi masyarakat yang positif akan lahir, jika sikap mental masyarakat yang baik sebagai implikasi dari nilai-nilai budaya secara emosional melekat pada diri masyarakat tersebut.

Untuk meningkatkan partisipasi, lebih-lebih di dalam masyarakat modern seperti sekarang dan beraneka ragamnya tingkat status masyarakat diperlukan rekayasa nilai-nilai budaya agar mampu diadaptasikan secara dinamis ditengah-tengah kehidupan yang modern seperti sekarang ini. Dengan mengadaptasikan secara dinamis rekayasa nilai-nilai budaya tersebut, diharapkan yang berwenang akan mampu menumbuhkan partisipasi yang positif ditengah-tengah masyarakat dalam upaya pelaksanaan disiplin nasional, khususnya partisipasi masyarakat terhadap Kegiatan Sosial di lingkungannya.

Upaya meningkatkan dan mensukseskan setiap kegiatan sosial memerlukan persepsi masyarakat yang positif, sikap masyarakat yang simpatik, dan partisipasi yang aktif dan positif sebagai hasil rekayasa nilai-nilai budaya yang adaptif dinamis, untuk mensukseskan usaha tersebut.

Peran serta masyarakat perlu ditanamkan, karena kegiatan sosial adalah karya milik masyarakat budaya tersebut. Masyarakat, lebih-lebih yang mendapat atau yang berada di sekitar pelaksanaan kegiatan sosial harus merasa "melu handarbeni" atau ikut memiliki, sehingga secara suka rela dan swakarsa mau berpartisipasi atau berperanserta terhadap pelaksanaan Kegiatan Sosial.

Dalam kaitannya dengan kegiatan sosial, maka partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur kunci yang menentukan keberhasilannya. Partisipasi aktif masyarakat ini berkaitan erat dengan kemampuannya dalam menangkap makna dari kegiatan atau program yang bersangkutan. Kemampuan ini dapat menjadi landasan yang utama bagi keterlibatan dan aktivitas masyarakat dalam melaksanakan program tertentu. Makna yang ditangkap, baik positif maupun negatif akan menjadi pendorong atau penghambat keterlibatannya dalam suatu kegiatan.

Kenyataan menunjukkan bahwa pengalaman hidup sehari-hari sering mengakibatkan warga masyarakat kurang bersikap terbuka untuk secara jujur menyatakan pandangan atau pendapatnya mengenai suatu program yang secara resmi diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, aparat pemerintah seyogianya waspada terhadap kelompok masyarakat yang ku-

rang mampu memahami makna kegiatan sosial sehingga akan mengeliminasi adanya partisipasi masyarakat yang semu. Partisipasi semacam itu dapat menghambat pelaksanaan program sehingga pada gilirannya akan mempersulit tercapainya tujuan secara utuh dan mantap.

Partisipasi yang tumbuh dari dalam mungkin akan lebih berarti dibandingkan dengan partisipasi yang tumbuh sebagai akibat adanya pengaruh dari luar (aparatur pemerintah). Dengan kata lain, partisipasi yang tumbuh sebagai akibat adanya pengaruh dari luar tetap memiliki peranan yang penting bagi tercapainya disertai dengan kesadaran bahwa aktivitasnya sangat bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan.

Penanaman persepsi tentang suatu program di kalangan masyarakat luas sangat penting artinya. Apa yang dilakukan dan mengapa suatu kelompok masyarakat melakukan suatu kegiatan sering kali didasarkan pada persepsinya, yang dipengaruhi oleh latar belakang budayanya yang khusus (Spradley, 1980). Penanaman persepsi tentang suatu program memungkinkan terjadinya persepsi yang sama dari setiap kelompok masyarakat sehingga akan memperlancar jalannya program pembangunan tersebut.

Di lokasi penelitian upaya untuk memberikan pemahaman yang utuh akan suatu kegiatan sosial telah dilakukan melalui berbagai kegiatan, baik pada tingkat RT, RW, Dukuh maupun pada tingkat Kelurahan. Dengan cara ini, maka di antara warga akan memiliki keragaman pandang terhadap suatu kegiatan yang harus dijalaninya yang pada gilirannya mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut.

Kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh warga di lokasi penelitian ini cukup banyak, baik yang terorganisasi secara formal maupun tidak. Dalam laporan ini hanya beberapa kegiatan sosial yang menonjol dan berhasil tercover dalam pengamatan dan observasi peneliti saja yang akan dideskripsikan. Kegiatan sosial yang terorganisasi secara formal antara lain meliputi LKMD, PKK, Karang Taruna, dan siskamling; sedangkan kegiatan sosial yang tidak terorganisasi secara formal antara lain adalah *sambatan* atau gotong royong, pralunan, dan kerja bakti.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah induk dari semua organisasi sosial di kelurahan. Lembaga ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari Lembaga Sosial Desa (LSD). Ditinjau dari sejarahnya LSD ini telah ada sejak tahun 1960-an. Sejak tahun 1961 berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI, LSD ditetapkan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat desa. Namun dalam perkembangan selanjutnya pemerintah beranggapan bahwa LSD perlu disempurnakan, yaitu berfungsi sebagai lembaga untuk mewu-

judkan ketahanan desa yang mantap. Atas dasar perkembangan pemikiran tersebut, maka keluarlah Keputusan Presiden RI tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Sebagai layaknya suatu lembaga, LKMD mempunyai sebuah pengurus yang terdiri dari para pemuka masyarakat yang ada di desa atau kelurahan yang bersangkutan. Susunan kepengurusannya meliputi: Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi. Seksi-seksi ini meliputi: Seksi Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban; Seksi Pendidikan dan Pembudayaan P-4; Seksi Penerangan; Seksi Perekonomian; Seksi Pembangunan, Prasarana dan Lingkungan Hidup; Seksi Agama; Seksi PKK, Seksi Kesehatan, Kependudukan, dan KB, Seksi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian; dan Seksi Kesejahteraan Sosial.

Sistem keanggotaan dalam LKMD adalah pasif, artinya bahwa semua penduduk desa atau kelurahan dengan sendirinya adalah anggota LKMD. Oleh karena itu secara otomatis mempunyai kewajiban untuk membantu setiap kegiatan atau program dari LKMD. Di dalam prakteknya tidak semua masyarakat tahu tentang hal itu. Di samping itu sering kali di dalam prakteknya seperti di kelurahan Gilingan antara LKMD dengan organisasi-organisasi pelaksana masing-masing sektor seperti PKK, Organisasi Pemuda, dan lainnya nampak sebagai organisasi yang berdiri sendiri. Dalam keadaan seperti itu, maka partisipasi masyarakat terhadap LKMD menjadi tidak jelas karena ketidaktahuan mereka.

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, sebagai organisasi seksi dari LKMD merupakan organisasi arahan dari atas tetapi mendapat dukungan dari bawah (masyarakat). Di kelurahan Gilingan, pembinaan hubungan antara pengurus dengan anggota (ibu-ibu rumah tangga) terjalin secara selaras. Pendekatan yang dilakukan adalah secara kekeluargaan dengan tatap muka pada perkumpulan-perkumpulan ibu-ibu ditingkat RT, RW, maupun di tingkat kelurahan. Dengan cara demikian, maka komunikasi di antara mereka menjadi semakin erat.

Ketua Umum PKK adalah Bu Lurah, dengan demikian secara organisatoris isteri lurah akan selalu berhubungan dengan lurah. Jalur demikian dirasakan sangat efektif dan efisien, sehingga dinamika organisasi PKK dapat berjalan lancar. Struktur organisasi PKK di kelurahan Gilingan terdiri dari Ketua Umum sebagai Koordinator, didampingi oleh tiga Ketua (I, II, dan III) yang bertanggungjawab atas seksi-seksi khusus. Kemudian terdapat dua Sekretaris, dua Bendahara, dan sebagai kelengkapan terdapat empat seksi.



Program PKK memiliki kegiatan terpadu yang disebut sepuluh segi pokok PKK. Kesepuluh tujuan PKK akan tercapai bila semua anggotanya mendukung program tersebut. Anggota PKK adalah semua warga kelurahan yang diwakili oleh ibu rumah tangga. Mereka inilah yang sebenarnya memahami keadaan sosial desa dengan segala problematikanya. Itulah sebabnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah masalah sehari-hari di kelurahan.

Melalui organisasi PKK ini, peranan wanita dapat dimobilisasi secara maksimal. Untuk hal itu, di kelurahan Gilingan organisasi PKK ini cukup berkembang positif. Diikutsertakannya kelurahan Gilingan dalam lomba Posyandu dan UPGK merupakan bukti bahwa kegiatan-kegiatan para wani-



**Gambar 1**  
**Album kegiatan UPGK yang beranekaragam kegiatan**

tanya dalam bidang pembangunan cukup menonjol. Semua itu juga merupakan indikator bahwa selama ini para ibu-ibu pengurus PKK (dengan dukungan para anggotanya) cukup tertib dan disiplin. Tidak berlebihan kalau dikatakan disiplinnya cukup tinggi. Kegiatan mereka juga cukup beragam, mulai dari penyuluhan tentang kesehatan, KB, arisan, pembinaan kebersihan lingkungan (seperti telah dikemukakan di muka), dan kegiatan-

kegiatan lain yang tujuannya adalah meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan.

Organisasi sosial yang melingkupi para remaja baik putra maupun putri adalah Karang Taruna. Dengan adanya organisasi pemuda semacam ini, maka aspirasi dan potensi pemuda di kelurahan Gilingan telah mempunyai wadah yang mampu merealisasikan aspirasi dan mengatur potensinya tersebut secara terarah. Anggota organisasi pemuda sudah barang tentu adalah para pemuda dan pemudi, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang telah berkeluarga tetapi masih berjiwa muda. Seperti organisasi lainnya, organisasi pemuda ini juga mempunyai susunan kepengurusan mulai dari Ketua sampai Bendahara, dan anggota. Organisasi ini terdapat baik di tingkat kelurahan maupun tingkat dukuh. Kegiatannya meliputi beberapa bidang yang satu sama lain berbeda. Kegiatannya terutama sangat menonjol justru di tingkat dukuh. Kegiatan tersebut seperti Olah Raga, Kesenian, dan sejenisnya. Sampai penelitian ini dilakukan, kegiatan pemuda di kelurahan Gilingan nampak berjalan baik dan lancar.

Meskipun secara umum kegiatan remaja (pemuda) di kelurahan Gilingan dapat dinilai baik dan positif, namun demikian masih terdapat sebagian pemuda di dukuh (kampung) Bibis yang memerlukan perhatian khusus. Terdapat sebagian remaja di kampung Bibis ini yang mengelompok sendiri dengan aktivitas yang kurang baik, seperti begadang dan minum-minum. Telah diadakan pendekatan secara baik-baik, tetapi sampai penelitian ini dilakukan masih belum dan sulit berubah. Bahkan diarahkan ke kegiatan yang positif, seperti kegiatan olah raga, tetapi tidak jalan. Dalam rangka pembinaan terhadap kelompok ini, pihak kelurahan juga sudah bekerjasama dengan Tim Babinkam, Babinsar, dan Koramil. Kejadian terakhir yang berhasil dicover oleh aparat kelurahan bahkan cukup mengejutkan, yaitu ada anak SD Klas VI yang tertangkap karena mengambil kendaraan roda dua. Namun demikian, pembinaan terhadap kelompok ini akan terus dilakukan, karena bagaimanapun itu adalah kewajiban bagi aparat yang tidak boleh berhenti.

Kegiatan sosial yang terdapat di kelurahan Gilingan yang sering dilaksanakan tetapi tidak terorganisasi secara formal adalah *Sambatan*. *Sambatan* adalah lembaga tradisional yang bertujuan untuk saling tolong menolong sesama warga dan bergerak dalam keperluan rumah tangga. Kata *sambatan* sering disamakan atau diberi pengertian dengan istilah *gotong royong*, *tolong menolong* (Koentjaraningrat, 1981). Pada mulanya banyak keperluan rumah tangga yang bisa diselesaikan melalui lembaga adat yang namanya sambatan ini. Misalnya tahap-tahap penggarapan tanah pertanian, mendirikan atau memperbaiki rumah, menggali sumur, persiapan pesta atau



upacara perkawinan atau khitanan, peristiwa kecelakaan atau bencana. Dewasa ini telah banyak terjadi perubahan. Kegiatan sambatan tinggal terbatas pada persiapan pesta atau upacara dan peristiwa kecelakaan atau bencana. Itupun sudah tidak seperti dulu, segalanya telah banyak berubah.

Perlu diketahui, meskipun sambatan ini merupakan lembaga sosial, akan tetapi bukanlah merupakan lembaga yang lengkap dengan personalia kepengurusan: ada pimpinan, pembantu, dan anggota pengurus yang seolah-olah melayani warga masyarakat, melainkan suatu lembaga sosial tradisional yang pada umumnya secara otomatis keseluruhan rumah tangga menjadi anggota tanpa persyaratan khusus. Tokoh pimpinan sebagai orang atau figur yang mempunyai status lebih tinggi dibandingkan yang lain, tidak dikenal dalam lembaga sosial tradisional ini. Jadi yang ada hanyalah individu-individu yang secara kebetulan menjadi pengurus dan warga masyarakat yang diurus.

Aktivitas warga masyarakat dalam kegiatan sambatan pada umumnya menyatakan akan bersedia kalau diminta oleh yang punya keperluan. Jadi prakarsa adanya kegiatan ini lebih banyak tergantung pada si empunya kerja. Di samping itu, tingkat formalitas lembaga tradisional ini juga lebih banyak tergantung pada si empunya kerja. Jika rencana kerjanya besar dan tamu yang direncanakan itu banyak, dalam gedung yang luas, pada umumnya pembentukan kepengurusannya lebih lama, dan cukup serius. Di kalangan pemuda dalam rangka membantu pesta atau upacara seperti dicontohkan, telah mempunyai organisasi atau lembaga yang agak paten, yaitu yang disebut *sinoman*. Lembaga sosial tradisional yang dimiliki oleh pemuda ini ada di setiap RW atau dukuh.

Disiplin dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan semacam itu (pesta atau upacara) pada umumnya tinggi. Aktivitas warga masyarakat dalam hal ini tidak hanya terbatas pada menyumbangkan tenaganya saja, tetapi juga dapat berupa uang, beras, atau yang lainnya yang dianggap dapat bermanfaat dan dapat digunakan secepatnya untuk keperluan upacara atau pesta.

Kegiatan sosial yang hampir sama dengan sambatan adalah *pralenan*. Bedanya, kalau *pralenan* itu menyangkut peristiwa kematian, sehingga kalau sambatan itu lebih ditekankan pada unsur pencurahan tenaga bersama demi meringankan beban si empunya kerja secara bergantian, sedangkan *pralenan*, selain tenaga, bisa juga dalam bentuk pencurahan dana. Dalam hal pengumpulan dana untuk kepentingan kematian ini selain yang sifatnya individu spontan (pada saat ada kejadian), di kelurahan Gilingan juga telah dikembangkan iuran tiap bulan yang dikelola oleh tiap RW. Besarnya iuran tiap KK untuk keperluan ini bervariasi antara Rp. 150,- — Rp 250,-, tetapi

ada juga yang Rp 500,-. Semuanya berdasarkan kesepakatan bersama, tentang yang memberi lebih dari jumlah yang telah disepakati itu terserah kepada yang bersangkutan.

Kegiatan sosial lain yang terdapat di lokasi penelitian berupa siskamling dan kerja bakti. Siskamling di kelurahan Gilingan telah berjalan dengan baik. Hal ini jelas menunjukkan bagaimana disiplinnya warga dalam melaksanakan aturan-aturan yang telah dibuat bersama. Partisipasi warga juga cukup tinggi, hal itu terbukti dengan adanya pos-pos untuk kamling di tiap RT sebagai hasil dari swadaya warga sendiri. Selain itu dalam siskamling juga dikembangkan kegiatan yang namanya *jimpitan* yang berupa beras. Dalam hal ini setiap rumah setiap malamnya menyediakan beras di gelas atau tempat lain dan diletakkan di depan rumah. Cara ini selain dapat mengumpulkan dana dengan tidak terasa berat, juga dapat berfungsi kontrol apakah pada malamnya ada yang siskamling atau tidak. Tapi lepas dari itu, pada umumnya warga disiplin dalam melakukan siskamling. Sebab seperti dituturkan oleh beberapa warga, pernah ada warga yang tidak pernah keluar siskamling tanpa alasan, rumahnya dilempari "batu" oleh para pemuda. Tetapi diakui juga bahwa intensitas masing-masing warga di setiap RT tidaklah sama. Oleh karenanya memerlukan pembinaan yang terus menerus dari perangkat kelurahan.

Kegiatan sosial yang juga melibatkan warga, dan sering dilakukan di wilayah kelurahan Gilingan adalah kerja bakti, baik untuk kebersihan lingkungan maupun setahun sekali dalam rangka bersih desa. Untuk masalah bersih desa ini karena hanya terjadi setahun sekali, maka kegiatannya boleh dikatakan tidak begitu menonjol dan memerlukan perhatian yang serius.

Untuk yang pertama yaitu kerja bakti untuk kebersihan lingkungan tempat tinggal dilakukan secara periodik, minimal setiap bulan satu kali. Gerakan ini dapat dikatakan sebagai gerakan partisipasi langsung terhadap program pemerintah untuk menjadikan wilayahnya sebagai kota yang bersih. Menurut pengakuan perangkat kelurahan dan juga beberapa warga setempat, gerakan ini lebih cenderung untuk lebih mengefektifkan program kebersihan, sebab seperti telah dikemukakan di muka masalah penanganan sampah dari rumah ke tempat pembuangan sampah umum telah ada petugas (armada) kebersihan sendiri. Sehingga kalau setiap rumah pada setiap harinya sudah disiplin mau membersihkan kotoran dan membuangnya di tong sampah yang telah tersedia di setiap rumah, lingkungan dengan sendirinya akan menjadi bersih. Hanya saja di jalan-jalan atau tempat-tempat umum di luar jangkauan warga, itu memerlukan kegiatan bersama.

### **C. Disiplin dalam Hubungan Ketetanggaan**

Pada hakekatnya manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus hidup bersama dengan manusia yang lain di dalam suatu komunitas sebagai wadah untuk menyalurkan kebutuhan atau aspirasi-aspirasinya. Adanya kewajiban untuk hidup bersama, menempatkan manusia menjadi makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, maka setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya dalam kelompok, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Interaksi inilah yang menimbulkan adanya pergaulan sesama individu di dalam kelompok. Dalam konteks seperti inilah hubungan ketetanggaan itu muncul dan ada.

Kelompok-kelompok individu, dalam hubungan ketetanggaan pada umumnya memerlukan keteraturan, sehingga semua proses dapat berjalan dengan tertib dan harmonis. Oleh karena itu kelompok dalam hubungan ketetanggaan memerlukan aturan-aturan meskipun tidak harus tertulis yang melarang atau menganjurkan kepada seseorang warga kelompok dalam berbuat sesuatu agar hubungan ketetanggaannya menjadi harmonis, jauh dari konflik. Salah satu bentuk aturan (tak tertulis) yang menjadi acuan bersama agar tercipta hubungan ketetanggaan dalam hidup bermasyarakat yang tertib dan harmonis adalah tata kelakuan yang pada dasarnya melarang atau menganjurkan seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam keadaan tertentu. Dengan demikian tata kelakuan tersebut dapat berfungsi sebagai motivasi atau mengontrol seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Tata kelakuan tersebut pada satu sisi didasari oleh nilai atau gagasan tertentu yang diyakini, di sisi lain dicerminkan dalam tingkah laku seseorang. Pergaulan yang terjadi antar manusia yang masing-masing saling berbeda tata kelakuannya, baru akan berjalan tertib, lancar, dan harmonis jika keduanya sudah saling memahami tata kelakuan masing-masing. Jadi dari segi ini, maka tata kelakuan manusia berperan penting sebagai alat pembauran atau pergaulan antar manusia yang berbeda konsep kebudayaannya.

Dalam proses pergaulan dengan tetangga, seseorang selalu dihadapkan pada pola-pola tingkah laku yang harus ditaati, dapat berupa aturan-aturan yang dipakai dan diakui oleh masyarakat sebagai hal-hal yang benar, kurang benar atau salah dalam cara bertingkah laku (Wiriatmodjo, 1981). Selanjutnya dikatakan oleh Ralp Linton (1984), bahwa hubungan (pergaulan) sosial melalui jaringan sosial perseorangan atau pribadi adalah terpenting, jaringan pribadi tersebut meliputi jaringan kekerabatan, yaitu yang menyangkut sejumlah orang yang masih kerabat, jaringan tetangga dan sebagainya. Di dalam setiap macam hubungan tersebut, tingkah laku setiap

individu dipengaruhi oleh *Ideal patterns* masyarakatnya. *Ideal patterns* ini merupakan tolok ukur suatu tindak perilaku itu benar atau tidak benar.

Dalam hubungan ketetanggaan di lokasi penelitian, salah satu bentuk aktivitas tingkah laku yang memanifestasikan terciptanya hubungan ketetanggaan yang baik adalah "kebiasaan memberikan oleh-oleh" kalau seseorang tetangga datang dari bepergian jauh. Pemberian oleh-oleh tersebut terutama ditujukan kepada tetangga dekat. Kebiasaan seperti ini dulu hampir dapat dikatakan berlaku umum di lokasi penelitian. Tetapi sekarang ini kebiasaan seperti itu sudah mulai luntur, sehingga yang masih mengenal kebiasaan itu hanya sekelompok tertentu saja. Itupun sudah membatasi hanya tetangga dekat yang pada waktu itu sedang intim, atau yang masih ada hubungan kekerabatan.

Kebiasaan seperti diutarakan di atas, memang merupakan kebiasaan yang pernah menonjol dalam rangka mengembangkan hubungan baik sesama tetangga. Meskipun sekarang ini mulai memudar dan menunjukkan perubahan, tetapi diakui oleh warga bahwa gagasan, nilai yang terkandung di dalamnya, dan keyakinan yang mendasarinya masih mereka kenal. Akan tetapi masyarakat sekarang seringkali berfikir pragmatis dan praktis, sehingga kalau bepergian jauh maupun pulanginya berusaha untuk membawa barang sesedikit mungkin, sehingga membeli atau membawa oleh-oleh itu seringkali dianggap kurang praktis dan mengurangi kebebasan dalam perjalanan.

Suatu kebiasaan dalam bentuk lain tetapi dengan jiwa yang serupa, dan masih berlaku sampai sekarang di lokasi penelitian misalnya adalah: kebiasaan memberikan sesuatu yang tepat. Sebagai contoh, pada umumnya yang muda atau yang "lebih rendah status sosialnya" menggunakan bahasa Jawa *krama*, sebaliknya yang lebih tua (pada umumnya) atau "lebih tinggi status sosialnya" menggunakan bahasa Jawa *ngoko*. Sedangkan bagi mereka yang seimbang baik umur maupun status sosialnya umumnya menggunakan bahasa yang sama, baik *ngoko*, *ngoko campuran krama*, ataupun *krama*.

Fenomena-fenomena yang muncul dalam tata hubungan ketetanggaan di lokasi penelitian di atas, tidak jauh berbeda dengan kesimpulan Geertz (1983), yang mengatakan bahwa setidaknya-tidaknya ada enam hak yang mendasari sikap atau *tindak-tanduk* orang Jawa dalam berinteraksi. Enam hal tersebut yaitu: seks (jenis kelamin), usia, posisi (kedudukan), keagamaan, perasaan pribadi dan pertalian keluarga. Sikap badan, tangan, dan tataran bahasa Jawa yang digunakan pada waktu berinteraksi menunjukkan kedudukan individu Jawa baik yang berbicara maupun yang diajak bicara.

Pada saat melakukan kerja bersama (kerja bakti) secara bergotong royong, apabila pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan spesialisasi,

pada umumnya akan terjadi semacam pembagian tugas secara otomatis (dengan sendirinya). Bagi yang lebih muda atau "lebih rendah status sosialnya" akan menangani bagian pekerjaan yang lebih berat atau kasar, dan sebaliknya yang tua atau yang "lebih tinggi status sosialnya pada umumnya akan mendapat bagian pekerjaan yang lebih ringan atau tidak kasar, atau bahkan hanya memberikan petunjuk-petunjuk atau saran-saran. Jika yang terjadi itu hal yang sebaliknya, maka yang muda akan mendapat kecaman (langsung atau tidak langsung).

Dalam beberapa literatur (periksa Geertz, Murnis Seseno, Mulder), disebutkan bahwa kelakuan sosial Jawa ditentukan oleh prinsip-prinsip kerukunan dan hormat. Prinsip-prinsip tersebut dapat diartikan bahwa setiap individu Jawa dalam situasi apapun haruslah dapat bersikap untuk tidak menimbulkan konflik atau pertentangan. Untuk memenuhi prinsip kerukunan tersebut setiap individu harus mengetahui dan menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan yang berlaku dan menjaga keakraban. Sedangkan prinsip hormat dapat ditunjukkan dengan sikap badan, tangan, dan tataran bahasa yang digunakan terhadap orang yang dihadapi.

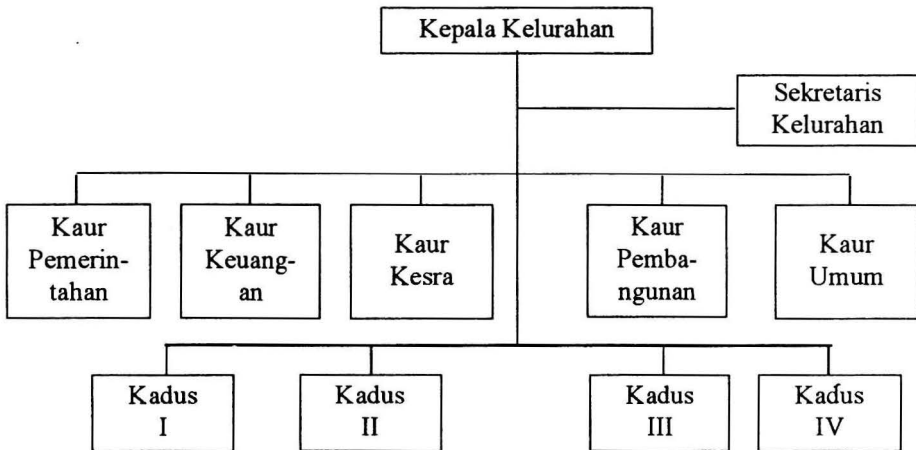
Hal-hal yang telah digambarkan di atas, meskipun intensitas dan kualitasnya tidak lagi seperti dahulu, dan ada bagian-bagian dalam perilaku dalam hubungan bertetangga yang berubah, namun seperti diakui oleh sebagian warga, "pada dasarnya gagasan, nilai budaya yang mendasarinya, serta keyakinan warga yang terangkum dalam kebiasaan tersebut belum banyak berubah". Mereka juga mengakui bahwa perubahan-perubahan tersebut akibat derasnya arus modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan yang tidak dapat ditolaknyanya.

Kehidupan masyarakat yang heterogin baik pekerjaan, pendidikan, dan kesibukan masing-masing individu dalam rangka mencari nafkah, juga diakui sebagai hal yang mau tidak mau mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan di atas, paling tidak wujud partisipasinya dari masing-masing individu dapat saja berubah, meskipun jiwanya tidak berubah. Sebagai contoh misalnya, dalam suatu kegiatan kerja bakti seseorang tidak dapat ikut terlibat langsung karena pekerjaannya, tetapi sebagai gantinya orang tersebut mau menyediakan fasilitas tertentu (minuman dan sejenisnya), maka masyarakat pada umumnya dapat memaklumi. Dalam kondisi kasus semacam ini, sangsi sosial menjadi relatif.

#### **D. Disiplin Terhadap Administrasi Pemerintahan**

Struktur pemerintahan yang ada di Kelurahan Gilingan secara garis besar terbagi menjadi Kepala Kelurahan sebagai pimpinan formal tertinggi dan perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan tersebut berturut-turut terdiri

dari Sekretaris Kelurahan, Kaur Pemerintahan, Kaur Keuangan, Kaur Kesejahteraan Rakyat, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, dan Kadus-kadus. Untuk lebih jelasnya lihat bagan berikut ini.



**Gambar**  
**Struktur Pemerintahan Kelurahan**

Masing-masing mempunyai fungsi dan tugas dan tanggungjawab masing-masing, dan mempunyai administrasi sendiri-sendiri tetapi dalam satu kesatuan di bawah pimpinan Kepala Kelurahan. Tertib tidaknya administrasi pemerintahan di kelurahan sangat tergantung pada berfungsi secara baik atau tidaknya perangkat kelurahan tersebut, baik secara individual maupun secara kolektif sebagai satu kesatuan di bawah pimpinan Kepala Kelurahan. Namun demikian, karena yang mereka kerjakan itu adalah masalah-masalah yang banyak berkaitan dengan berbagai kepentingan warga masyarakat, maka partisipasi masyarakat terhadap kelancaran dan tertibnya suatu administrasi pemerintahan di kelurahan juga merupakan suatu hal yang tidak dapat dilepaskan.

Dari hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa dalam hal administrasi pemerintahan di kelurahan Gilingan cukup tertib. Artinya masing-masing struktur yang ada dapat menjalankan tugas dan fungsinya serta bertanggungjawab tentang apa yang menjadi tanggungjawabnya. Alat-alat atau sarana prasarana penunjang bagi kelancaran dan ketertiban juga cukup tersedia. Beberapa papan monografi, dan sejenisnya seperti peta kelurahan juga terpampang dengan rapi di bagian tengah kantor kelurahan. Bahkan piala dan piagam-piagam kejuaraan yang pernah diraih oleh kelurahan

Gilingan terpampang dan tersimpan secara baik di sebuah almari kaca di ruang tengah, sehingga siapapun yang masuk ke kantor kelurahan tersebut akan langsung dapat melihat prestasi yang membanggakan yang pernah di raih oleh kelurahan tersebut.

Menurut pengakuan Pak Lurah, selama beliau menjabat sebagai Lurah di Gilingan belum pernah mendapat teguran dari atasan (aparatur Kecamatan maupun aparat Pemerintah Daerah) karena masalah kelambatan laporan administrasi pemerintahan kelurahan. Bahkan dengan bangga Pak Lurah mengatakan bahwa kesabaran warganya dalam tertib administrasi pemerintahan kelurahan dapat dikatakan sangat tinggi. Selain Restribusi untuk sampah paling lancar untuk seluruh Kota Madia Surakarta, para warga di kelurahan Gilingan dalam pembayaran PBB-nya juga tertib dan lancar.



**Gambar 2**  
**Keadaan di ruang tengah Balai Kelurahan rapi.**

Segala buku-buku dan lembaran kertas-kertas yang menyangkut segala data-data tentang kelurahan Gilingan, meskipun sederhana juga nampak tersusun rapi dalam rak, dan lemari kayu. Laporan-laporan baik bulanan maupun tahunan selalu dikerjakan dengan baik. Sebagai contoh misalnya data monografi aktif (tiap bulan) ketika peneliti datang pada pertama kali pada bulan Agustus 1992, di kelurahan tersebut telah dibuat laporan ke



kecamatan sampai bulan Juli 1993. Dinyatakan oleh Pak Lurah, bahwa untuk masalah-masalah yang menyangkut pelaporan ke atas, mereka berusaha untuk tidak *nunggak*.

Selanjutnya dikatakan oleh Pak Lurah dan perangkatnya, bahwa masalah disiplin administrasi, partisipasi warga secara keseluruhan sangat mendukung. Sebagai contoh dikatakan bahwa pada umumnya warga sangat tertib dalam hal perbaikan atau perpanjangan Kartu Tanda Penduduk. Warga yang akan pindah juga secepatnya diminta untuk mengurus surat-surat. Demikian juga bagi warga yang baru (pendatang) harus secepatnya lapor kepada Pak RT, dan selanjutnya RT lapor ke Kelurahan. Itu berlaku bagi warga yang akan menetap atau tidak menetap, semua terkena ketentuan yang sama. Semua itu terkontrol oleh RT, dan kemudian laporan akan sampai ke kelurahan, karena setiap bulan sekali ada pertemuan antar RT di kelurahan.

Secara sepintas jika kita amati kantor kelurahan Gilingan dan lingkungannya nampaknya semrawut. Terutama sekali yang paling kelihatan karena di samping kiri Kantor Kelurahan digunakan untuk parkir umum kendaraan roda dua. Sehingga kalau bertepatan pada hari-hari yang padat orang menitipkan kendaraan, pemandangan kantor kelurahan akan nampak semrawut dari luar. Namun jika kita sudah masuk, kesan itu akan segera berubah.

Diakui oleh semua perangkat yang ada (termasuk Pak Lurah) bahwa lokasi kantor kelurahan dan kapasitas kantor itu sendiri sudah kurang memadai untuk kegiatan dalam arti luas. Paling tidak lingkungan kelurahan sudah tidak Berseri lagi dan tidak nyaman untuk bekerja, karena suara bising yang terdengar sepanjang hari dari terminal Bis yang tepat berada di belakangnya. Di tambah lagi jalan di depan kantor kelurahan merupakan jalan padat kendaraan, terutama Bis luar kota yang keluar dari stanplat. Sehingga tidak hanya lokasi dan kapasitas kantor kelurahan saja, tetapi jalan yang ada di depannya pun sudah tidak layak untuk sebuah kantor kelurahan. Atas pertimbangan itu, maka sebentar lagi (rencana bulan Januari 1993) kantor kelurahan akan pindah ke Brumbung. Sedangkan kantor kelurahan lama di Gilingan tersebut akan dibongkar untuk perluasan terminal Bis Gilingan.



## **BAB IV**

### **DISIPLIN MASYARAKAT**

#### **DI LINGKUNGAN TEMPAT-TEMPAT UMUM**

##### **A. Disiplin di Lingkungan Pasar**

Pada hakekatnya pasar adalah sebuah pranata yang mengatur komunikasi dan interaksi antara para penjual dan pembeli yang bertujuan untuk mengadakan transaksi pertukaran benda dan jasa ekonomi dan uang serta tempat hasil transaksi dapat disampaikan pada waktu itu atau pada waktu yang akan datang berdasarkan harga yang telah ditetapkan (Koentjaraningrat, 1984: 129). Karena adanya proses interaksi antara manusia yang satu (penjual) dan manusia yang lain (pembeli), maka pasar selain mempunyai peran sebagai pusat ekonomi, juga sekaligus sebagai pusat kebudayaan.

Sebagai pusat ekonomi, jelas nampak pada aktivitasnya di mana pasar melancarkan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi. Hal itu dapat dilihat dalam perubahan-perubahan yang terjadi di bidang produksi, konsumsi, maupun distribusi. Sedangkan sebagai pusat kebudayaan, karena peran yang dimainkan oleh pasar dengan pranata-pranatanya akan langsung atau tidak langsung diikuti oleh masyarakat sekitarnya. Selain itu peranan yang dibawakan dapat membawa perubahan-perubahan baik di bidang ekonomi, maupun budaya yang menyangkut nilai-nilai baru atau perilaku baru bagi masyarakat sekitarnya. Jelasnya pasar sebagai pusat kebudayaan akan terjadi perubahan-perubahan sosial-budaya sebagai akibat pembauran (interaksi) dan pembaharuan.

Pasar telah menjadi arena perjumpaan antar manusia yang berbeda baik tingkat sosial maupun segi-segi kulturalnya. Dengan demikian di pasar tersebut. Kecenderungan orang untuk pergi ke pasar menjadikan proses interaksi masyarakat sering terjadi, yang berarti sering terjadi kontak-kontak budaya.

Pasar yang menjadi objek penelitian ini adalah pasar Ngemplak, yang merupakan pasar terbesar yang berada di kelurahan Gilingan, kecamatan Banjarsari, Kota Madiya Daerah Tingkat II Surakarta. Pasar Ngemplak ini di dalamnya menyediakan bermacam-macam barang kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sekitarnya, dari mulai barang kelontong, mainan anak sampai belanjaan untuk keperluan dapur. Lokasi pasar tersebut terletak diperempatan "Ngemplak" yang cukup padat arus lalu lintasnya. Perempatan ini merupakan pertemuan antara Jalan A. Yani (dari sebelah Barat dan Timur), Jalan Jendral Sutoyo (dari sebelah Utara), dan Jalan A. Penjaitan (dari sebelah Selatan).



**Gambar 3**  
**Pasar Ngemplak nampak dari seberang jalan.**

Pasar tersebut bukanlah pasar besar, tetapi karena letaknya yang dekat perempatan jalan lalu-lintas kendaraan umum, dan di depan pasar itu dijadikan tempat untuk pemberhentian angkutan umum (bis umum), maka pada jam-jam tertentu nampak banyak orang yang bergerombol di situ, sehingga suasana pasar kelihatan ramai dan penuh sesak. Selain itu di depan dan di samping pasar juga berderet-deret becak-becak yang mangkal menunggu penumpang. Banyak orang yang lalu-lalang masuk keluar pasar baik untuk kepentingan membeli sesuatu barang kebutuhan maupun sekedar lewat saja. Dalam keadaan seperti ini, maka pada jam-jam tertentu pasar Ngemplak tersebut kelihatan padat. Kenyataan tersebut masih ditambah lagi dengan adanya para pedagang kaki lima dan pedagang asongan yang berada di sekitar pasar yang nampak kurang tertib.

Karena banyaknya aktivitas yang ada di dan sekitar pasar, maka jenis sampah yang dibuang di sekitar pasar Ngemplak tersebut juga bermacam-macam. Dari berbagai jenis sampah yang dihasilkan dari aktivitas pasar tersebut, yang paling banyak adalah sampah dari daun-daun bekas pembungkus kebutuhan sehari-hari di dalam pasar, plastik pembungkus makanan, dan kertas-kertas/bahan bekas pembungkus lainnya. Sampah-

sampah tersebut pada umumnya sudah di buang di tempat-tempat sampah yang telah disediakan, kecuali sampah-sampah yang berserakan di depan pasar yang sebagian besar disebabkan kurang tertib dan disiplinnya para pembeli yang membuang sampah seenaknya. Jenis sampahnya pada umumnya berupa puntung rokok, sobekan kertas, dan plastik, baik bekas pembungkus rokok, permen, maupun bekas pembungkus es.

Masalah kebersihan pasar tersebut oleh perangkat pemerintahan Kelurahan Gilingan memang diakui sebagai masalah yang kompleks, dan kalau ingin tetap beres (bersih), maka perlu dilakukan pembinaan dan monitoring yang terus menerus. Menyadari akan masalah tersebut maka Tim PKK kelurahan, secara rutin yaitu 2 (dua) kali dalam satu bulannya selalu memberikan pengarahan, penyuluhan dan sekaligus mengadakan monitoring tentang kebersihan pasar tersebut. Dari hasil jerih payah usaha Tim PKK ini dan tentunya didukung oleh warga pasar ternyata tidak sia-sia. Kelurahan Gilingan sering mendapatkan juara dalam lomba kebersihan se Kota Madia Surakarta. Dalam lomba semacam itu, bersih dan tertib tidaknya sebuah pasar juga ikut dinilai. Tetapi disadari pula bahwa meskipun sudah juara, namun pembinaan, pengarahan, dan monitoring itu harus tetap dilakukan. Hal tersebut terbukti misalnya pada saat-saat tertentu sekitar pasar masih saja sering kelihatan kurang bersih. Membudayakan hidup tertib dan bersih memang bukan hal yang sekali jadi, tetapi memerlukan proses yang cukup lama.

Dalam hal memanfaatkan ruangan pasar yang tersedia, pada umumnya para pedagang telah melakukannya semaksimal mungkin. Akan tetapi karena barang-barang yang diperdagangkan itu beraneka ragam, maka nampak sekali ruang yang tersedia itu penuh sesak. bahkan di pertokoannya (kios), ruangnya nampak penuh sesak dan sampai keluar (terasnya) juga penuh bergelantungan barang-barang yang dipamerkan. Keadaan seperti ini umum terjadi juga dipasar-pasar yang lain. Berbeda sekali kalau kita lihat di pertokoan-pertokoan besar yang berderet di tepi jalan besar misalnya. Artinya bagi mereka para pedagang keadaan seperti itu merupakan hal yang biasa, bukan sebagai gejala yang menunjukkan ketidaktertibannya. "Memang keadaannya begitu, maunya berdagang berbagai macam jenis dan dengan jumlah yang banyak tetapi tempatnya kurang", begitu pengakuan beberapa penjual. bahkan maunya semua yang diperdagangkan itu dipamerkan, dengan berbagai cara.

Seperti telah dibicarakan di muka, ditinjau dari segi ekonomi, maka pasar merupakan tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Tetapi apabila kita perhatikan lebih jauh dan seksama, maka pasar bukanlah hanya

merupakan ajang pertemuan antara pembeli dan penjual saja. Dengan adanya pasar, maka dapat terjalin interaksi antara pembeli dengan pedagang, pembeli dengan pembeli, pembeli dengan penjual jasa, pembeli dengan pegawai pasar, pedagang dengan pedagang, pedagang dengan pegawai pasar, pedagang dengan penjual jasa.

Hubungan dan interaksi antar mereka di atas pada umumnya terjadi wajar-wajar saja. Hubungan yang menonjol lebih nampak pada hubungan yang sifatnya kerjasama, artinya kedua belah pihak saling membutuhkan dan menguntungkan. Sedangkan hubungan yang sifatnya konflik dan persaingan (khususnya antar penjual), walaupun diakui oleh beberapa penjual bahwa hal itu ada dan sulit untuk dapat dihindari, tetapi konflik atau persaingan yang muncul tidaklah begitu menonjol. Hal itu dapat dibuktikan dengan mudah terutama dalam penetapan harga jual pada barang-barang sejenis. Mereka telah sepakat untuk memberi tarif dan mengambil keuntungan yang seragam. Tentang hal ini, meskipun tidak ada aturan tertulis yang mengikat mereka pada umumnya mengakui bahwa mereka teman sesama penjual menjadi kurang baik. Oleh karena itu sedapat mungkin selalu dihindari.

Hubungan antara petugas pasar dengan pedagang sifatnya lebih menonjol ke formal dan mengikat. Sebab para pedagang terikat pada peraturan pasar yang harus dijalankan, sedangkan peranan petugas secara langsung adalah sebagai pengawas, dan juga penarik distribusi. Sedangkan hubungan yang sifatnya tidak formal antar mereka itu tergantung kepada siapa petugasnya.

## **B. Disiplin di Lingkungan Terminal**

Terminal Bis Gilingan yang menjadi objek penelitian ini, tidak hanya besar untuk ukuran Kota Madia Daerah Tingkat II Surakarta, tetapi juga merupakan terminal bis yang besar untuk ukuran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Untuk ukuran luasnya (besarnya) merupakan terminal terbesar nomor dua sesudah terminal Bis Terboyo di Semarang. Dan kalau dilihat dari arus Bis luar kota yang masuk dan ke luar dari terminal Gilingan, maka terminal Bis Terboyo Semarang kalah ramai.

Dari perbandingan yang cukup sederhana seperti di atas saja, maka dapat dibayangkan bagaimana padatnya arus keluar masuknya Bis di terminal Gilingan. Keadaan seperti itu jika penanganannya tidak baik, dan para petugasnya tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya masing-masing, maka sulit dibayangkan bagaimana ketertiban terminal tersebut, baik ketertiban dalam parkir Bisnya, dalam mencari penumpang, turun naiknya

penumpang, para pedagang kaki limanya, para pedagang asongannya, dan sebagainya. Tidak hanya pengelolaannya yang baik, tetapi kedisiplinan para petugas, khususnya, dan para pedagang, penumpang, dan sopir pada umumnya dalam mematuhi aturan yang ada sangat diharapkan.

Dalam banyak hal terminal Bis Gilingan Surakarta memiliki kelebihan di banding dengan terminal-terminal Bis lain di Jawa Tengah. Demikian penuturan seorang sopir Bis yang berhasil diwawancarai oleh penulis. Kesan tersebut tidaklah berlebihan. Penulis juga mempunyai kesan yang sama. Paling tidak meskipun dengan pengamatan sepintas, penulis pernah mengunjungi terminal-terminal bis yang cukup besar yang ada di Jawa Tengah, dan akhirnya sampai pada kesimpulan yang serupa. Terminal Bis Gilingan Surakarta memang lain!

Berdasarkan pengamatan, para supir Bis dari luar kota cukup tertib dan disiplin menurunkan para penumpangnya di tempat yang khusus dipergunakan untuk menurunkan penumpang (jalur khusus untuk penurunan penumpang), yaitu di tempat bagian depan sesudah Bis memasuki pintu Gerbang masuk Terminal Gilingan. Dan sesudah para penumpangnya turun semua, segera supir bis membawa bisnya ke tempat parkir (jalur) yang telah disediakan untuk masing-masing jurusan. Di jalur penurunan penumpang khusus tersebut memang Bis tidak diperkenankan parkir setelah penumpangnya turun semua. Aturan tersebut nampaknya dijalankan dengan penuh konsekuen oleh para sopir, sehingga jalur penurunan penumpang ini nampak tertib. Di jalur parkir bis-bis juga nampak berjejer rapi dan tertib pada jalur yang telah disediakan untuk masing-masing jurusan.

Penumpang yang turunpun cukup tertib dan menunggu bis berhenti lebih dahulu, tidak tergesa-gesa. Hal ini dikarenakan pada umumnya penumpang bis ke Surakarta di dalam bis tidak berdesak-desakan (jumlah penumpang dengan kapasitas kursinya tidak melebihi). Keadaan ini secara umum berlaku untuk bis yang datang dari jurusan manapun yang masuk ke terminal Gilingan, baik Bis Patas, maupun Non Patas, Kelas Ekonomi maupun Non Ekonomi.

Pada saat penelitian ini dilakukan, untuk penumpang yang akan naik Bis ke luar kota juga nampak tertib, khususnya untuk jurusan-jurusan Semarang, Tegal, Sukabumi Cirebon - Jakarta, Surabaya, Sragen, Wonogiri. Sedangkan untuk Jurusan Yogya, dan Semarang yang Non Patas nampak agak semrawut. Sebenarnya bukan karena penumpangnya, tetapi para calon-calonnya. Khusus untuk ke jurusan Yogyakarta, "nampaknya lebih banyak calonnya daripada penumpangnya", suara calo-calo saling berteriak keras memekakkan telinga, dan saling berebutan penumpang. Hal ini nampaknya

karena arus penumpang ke jurusan tersebut juga banyak. Ini tidak berarti bahwa untuk ke jurusan lain tidak ada calonnya, tetap saja ada, tetapi tidak sebanyak dan seagresif calo ke jurusan Yogyakarta.



**Gambar 4**  
**Suasana penumpang turun dari bis: tertib.**

Tentang kebersihan terminal, rasanya juga tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa potret kebersihan kota Solo juga tercermin di terminal bis Gilingan. Dari pojok Barat sampai ke pojok Timur, dari pintu gerbang masuknya bis sampai pintu gerbang keluarnya bis nampak bersih (kecuali sedikit di bagian Barat pada jalur Semarang, Tegal, Yogyakarta, pada waktu

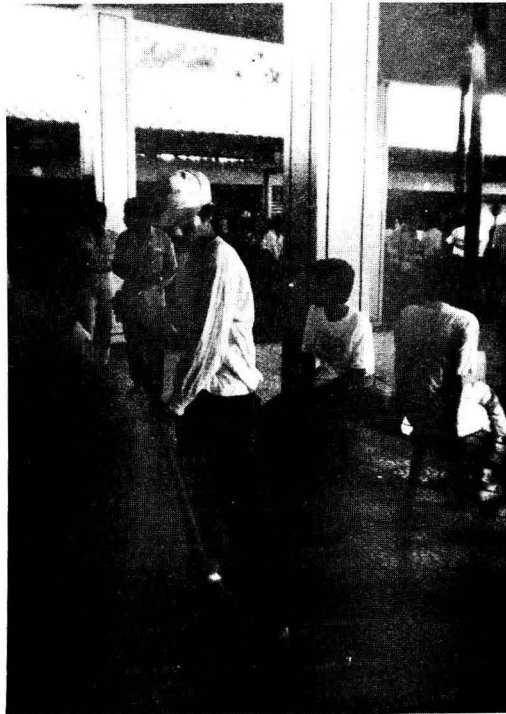


dilaksanakan penelitian ini memang masih dirombak dan pembangunannya belum selesai sepenuhnya). Tempat-tempat sampah berjejer rapi dengan jumlah yang mencukupi. Untuk mengingatkan para penumpang, dan siapapun yang masuk ke terminal bis Gilingan, hampir di setiap pilar yang didekatnya disediakan tong sampah, dipasang (ditempel) peringatan yang berbunyi "*Perda No.4 Tahun 1987 KEBERSIHAN KOTA Pelanggaran terhadap Ketentuan Ps. 3.6 & 7 (ayat 1) Hukuman Denda Setinggi-tingginya Rp 50.000,- atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga bulan)*".

Nampaknya papan peringatan itu cukup efektif, apalagi di dekat peringatan tersebut disediakan tong sampah, sehingga para calon penumpang yang duduk atau berdiri disekitarnya dapat membaca dengan jelas. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa mereka dengan hati-hati membuang sampah, dan tidak sembarangan. Bahkan ketika ada salah seorang berusaha membuang sampah kertas bekas bungkus dengan cara dilemparkan dan tidak tepat masuk ke tong sampah, orang tersebut dengan segera mengambilnya kembali dan memasukkannya ke tong sampah. Demikian juga para perokok ketika membuang puntung rokoknya. Selain itu, ketika orang melihat lantainya saja nampak bersih, maka secara psikologis akan menjadi tidak enak kalau membuang sampah (meskipun kertas kecil) secara sembarangan. Ini merupakan contoh baik, bahwa tidak sekedar pengumuman atau peringatan tetapi juga didukung oleh realita yang ada. Memasyarakatkan kebiasaan atau hidup bersih memang tidak hanya sekedar slogan atau anjuran melainkan memerlukan tauladan. Dan pemerintah Kota Madia Daerah Tingkat II Surakarta telah dengan baik dan konsekuen melakukan itu semua. Hal itu tidak dapat terlepas dari para petugas kebersihannya yang disiplin menjalankan tugasnya, dan tentu saja jumlah mereka ini juga cukup memadai.

Para petugas kebersihan di lingkungan terminal tersebut dapat dikatakan merupakan tulang punggung kebersihan lingkungan terminal, mereka mempunyai peran yang tidak kecil dalam berpartisipasi untuk menjadikan lingkungan terminal menjadi bersih. Para petugas kebersihan ini yang dikenal juga sebagai "pasukan baju kuning" dengan penuh disiplin menjalankan tugasnya. Dalam satu hari terminal dibersihkan (disapu) tiga kali, yaitu pagi, siang, dan sore. Tidak mengherankan keadaan terminal hampir sepanjang hari terlihat bersih. Bahkan kebersihan di dalam bis juga mendapat perhatian khusus dari pengelola bis. Mungkin ini dapat dan perlu ditiru oleh terminal-terminal bis lain. Di terminal bis Gilingan, sebelum bis meninggalkan terminal (berangkat) bis wajib dibersihkan dulu. Untuk keperluan itu sudah ada petugas khususnya, sedangkan sopir atau kondektornya hanya dibebani untuk membayar uang untuk kebersihan.

Beberapa hal yang masih nampak mengganjal dan hal ini memerlukan kesadaran dari semua saja, yaitu masih ada juga para pejalan kaki yang kurang peduli terhadap peringatan yang berbunyi "Pejalan Kaki Dilarang



**Gambar 5**  
**Petugas kebersihan yang selalu siap bertugas.**

Lewat Jalur Bis Sangat Berbahaya". Rupanya tidak hanya para pejalan kaki yang banyak kurang peduli terhadap hal itu, bahkan sekelompok tukang becak justru menunggu atau mencari penumpang di sekitar atau pinggiran jalur Bis yang dimaksud oleh peringatan tadi. Mereka nampak dengan penuh leluasa dan enak.

Setelah diamati cukup lama, ternyata ada dua pertimbangan yang melatarbelakangi para pejalan kaki tetap dengan penuh "kenekadan" melewati jalur bis. Pertama, dengan lewat jalur bis, maka orang tersebut akan terbebas dari membayar restribusi. Kedua, merupakan jalan pintas untuk keluar dari terminal ke tempat yang mereka tuju. Menurut pertimbangan mereka kenapa harus ke luar melalui jalan yang telah disediakan (ditentukan) kalau dengan lewat jalan di jalur bis itu justru lebih dekat atau tidak berputar ke



arah yang mereka inginkan. Sedangkan para tukang becak pada hekekatnya menunggu penumpang yang akan naik becak yang lewat daerah itu. Tukang-tukang becak itu adalah tukang-tukang becak bebas. Berbeda dengan tukang-tukang becak yang khusus atau resmi diperbolehkan beroperasi mencari penumpang di dalam terminal (umumnya berseragam kaos biru lengan panjang).

### **C. Disiplin di Lingkungan Tempat Hiburan**

Tempat hiburan yang dijadikan objek penelitian ini adalah Gedung Bioskop UP (UP Teatre) yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Surakarta. Dibandingkan dengan gedung bioskop-gedung bioskop di seluruh Surakarta, gedung bioskop UP Teatre ini termasuk kelas menengah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah harga Tanda Masuknya (HTM) tidak mahal, tetapi juga tidak murah. Sebab masih banyak yang lebih murah dan yang lebih mahal. dari perbandingan seperti itu, maka jelas pengunjungnya akan tidak kekurangan. Tempatnya juga cukup strategis, selain mudal dijangkau kendaraan umum (bis kota) juga terletak di perempatan jalan yang cukup ramai.

Di bioskop UP ini, para pengunjungnya pada umumnya cukup tertib, baik ketika membeli tiket tanda masuk maupun ketika masuk ke ruangan pertunjukan. Meskipun ruang tunggunya tidak begitu luas, namun para penonton cukup bersabar dan tidak berebutan semauanya sendiri dalam membeli tiket. Apabila mereka itu berdesakan ketika membeli tiket, itu masih dapat dikatakan wajar, artinya karena loket tempat pembelian tiketnya itu memang kecil sehingga jika ada tiga atau empat orang saja yang berdiri antri di depan loket akan nampak berdesakan. Di dalam gedungpun ketertiban dan kedisiplinan para pengunjung nampak juga. Dari empat kali pengamatan baik di luar gedung, maupun di dalam gedung keadaannya cukup tertib. Sebagai contoh, dalam hal duduknya mereka sopan, tidak ada yang merokok di dalam gedung, baik ketika film utama mulai diutar maupun pada waktu sebelumnya. Ketika film sedang diutarpun tidak terdengar suara-suara percakapan atau komentar yang menimbulkan berisik di dalam gedung yang mengurangi atau mengganggu kenikmatan menonton bioskop.

Ketertiban dan kedisiplinan pengunjung ketika membeli tiket tanda masuk maupun pada waktu masuk gedungnya, dapat saja dikaitkan dengan jumlah pengunjung yang tidak maksimal (meledak), sehingga mereka cukup santai tanpa ketakutan kehabisan tiket. Ini tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada desak-desakan dalam membeli tiket, tetap ada saja tetapi wajar. Namun demikian, kesadaran masing-masing pengunjung juga sangat menonjol. Ketika film yang diutar adalah film nasional yang banyak mengekspose adegan-adegan seronok misalnya, gambaran peneliti yang ikut

menyaksikan di dalam gedung, akan muncul komentar-komentar, teriakan-teriakan, tepuk tangan atau perilaku-perilaku lainnya yang dapat menimbulkan suara berisik dan mengganggu kenyamanan penonton lain, tetapi sampai akhir pertunjukan ternyata hal itu tidak pernah muncul. Di bioskop UP juga tidak kelihatan adanya calo, sehingga tidak ada penonton yang membeli karcis lewat calo.

Dari segi kedisiplinan pengelola, seperti tepat waktu dalam pemutaran filmnya, pembatasan umur bagi penonton dapat digambarkan sebagai berikut ini. Tentang tepat waktu pemutaran film utama, rupanya Bioskop UP tidak jauh berbeda dengan bioskop-bioskop lainnya. Dalam hal ini, bila dalam aturan mainnya ditetapkan jam 19.00 WIB misalnya, dalam praktiknya sering mundur. Bahkan penulis pernah mencoba datang terlambat dari waktu pertunjukan yang tercantum atau ditetapkan, ternyata tetap saja dilayani dan ketika masuk ke dalam film utamanya ternyata memang belum diputar. Hal ini bagi penulis sulit untuk mengatakan apakah itu merupakan



**Gambar 6**  
Sebuah poster yang terpampang besar di UP Teatre

sesuatu yang tidak disiplin atau karena memang harus begitu. Dalam hal ini ialah sebelum film utama diputar harus diputar dulu film-film ekstra sebagai iklan. Meskipun demikian ternyata ada juga gedung bioskop tertentu yang tidak begitu. Lepas dari itu semua, yang jelas penontonnya tidak ada yang protes tentang masalah ketepatan waktu ini. Bahkan banyak dari para penonton justru tidak begitu senang kalau dalam pengumumannya disebutkan main jam 19.00 WIB, dan dalam prakteknya benar-benar tepat main pada jam yang telah diumumkan tersebut. Sebab menurut mereka, kalau mereka datang tepat seperti waktu yang diumumkan atau terlambat sedikit saja bisa-bisa ketinggalan (filmnya sudah main), sehingga kesannya tergesa-gesa. Jelasnya banyak di antara kita memang belum siap untuk tepat waktu.

Pembatasan usia penonton di UP Teatre, meskipun secara tertulis ada dan sering dicantumkan ketika memutar atau mengiklankan film tertentu, tetapi dalam prakteknya tidaklah begitu ketat. Artinya, meskipun film yang diputar itu mestinya hanya untuk konsumsi 17 tahun keatas, dalam prakteknya hal ini tidak begitu terkontrol. Banyak pengunjung yang menurut pengamatan penulis masih remaja dan belum menginjak usia tujuh belas tahun. Sebab sebagaimana pengakuan dari salah seorang petugasnya, hal itu sulit dan rasanya tidak wajar kalau setiap pengunjung diminta harus menunjukkan KTP-nya, misalnya. Untuk menanyakan setiap pengunjung apakah sudah berumur tujuhbelas atau belum juga dirasakan tidak etis. Itulah sebabnya kadang banyak remaja yang belum cukup umur nonton dengan enaknnya sebuah film yang mestinya belum konsumsinya. Anehnya para remaja yang nonton tersebut tidak merasa ada beban usia, mereka nampaknya biasa saja, dan semua orang nampaknya juga tidak peduli.

Usaha yang sering dilakukan oleh pengusaha-pengusaha bioskop adalah mengekspose masalah seks yang berlebihan dalam iklan-iklannya. Dalam hal ini sering termakan oleh ekspose yang semacam itu adalah para remaja. Hal itu dikarenakan rasa ingin tahunya yang begitu tinggi. Dari sisi ini tidak mengherankan pula jika penontonnya banyak terdiri dari para remaja yang mungkin sudah atau belum umur tujuh belas tahun.

#### **D. Disiplin di Jalan Raya**

Masalah kesemrawutan lalu lintas jalan raya merupakan persoalan yang memusingkan yang lazim dihadapi oleh wilayah perkotaan. Masalah lalu-lintas di jalan raya, selalu dihadapkan-pada beberapa faktor, paling tidak ada tiga faktor penting yang menonjol yang ikut berpengaruh yaitu menyangkut manusia yakni pengemudi, faktor jalan dan kendaraan.

Faktor jalan, hal ini telah diatur sedemikian rupa sehingga upaya-upaya untuk meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas terus dilakukan

oleh pemerintah. Diakui bahwa daya tampung jalan selama ini kalah cepat dengan pertumbuhan jumlah kendaraan angkutan, serta terpusatnya jalur-jalur tertentu di satu kawasan, menyebabkan kesemrawutan lalu-lintas. Kecuali itu yang paling penting adalah faktor manusianya yakni para pengemudi kendaraan. Ini sangat menyangkut disiplin diri, terutama dalam hal mentaati segala aturan-aturan yang menyangkut tentang lalu lintas jalan raya. Selama faktor yang satu ini belum beres, maka sulit untuk menciptakan ketertiban, dan lebih jauh tentang kenyamanan di jalan raya.

Secara umum tingkat kesadaran pengemudi atau pemakai jalan dalam mematuhi aturan-aturan lalu lintas, khususnya di Kota Madia Surakarta sekarang sudah cukup tertib. Hanya di lokasi-lokasi tertentu yang keadaannya lain dan memerlukan perhatian khusus. Beberapa lokasi khusus yang memunculkan kasus khusus dan lain dibandingkan lokasi lain serta memerlukan perhatian khusus tersebut diantaranya adalah di ketiga lokasi yang di pilih untuk obyek penelitian ini. Jadi perlu ditekankan di sini, berdasarkan pengamatan dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait. keadaan lalu lintas di tiga lokasi penelitian ini memang lain. Secara mudahnya saja jika kita mengamati sepanjang jalan dan perempatan-perempatan atau simpang jalan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi di tengah kota, akan berbeda sekali dengan suasana di tempat lain.

Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan terhadap semua pengemudi, sebab kalau sudah di jalan raya, sulit untuk memastikan apakah pengemudi kendaraan tertentu itu warga setempat atau bukan. Demikian juga untuk pemakai jalan selain pengemudi, pejalan kaki, penyeberang misalnya. Karena kesulitan teknis seperti ini, maka observasi dilakukan hanya menekankan pada tempat atau lokasinya dan tidak melihat siapa dan dari mana asal pengemudi atau pemakai jalan tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan tiga lokasi yaitu di Perempatan Ngemplak, Pertigaan Gilingan, dan Perempatan Gilingan. Ketiga lokasi ini masih dalam satu wilayah kelurahan Gilingan. Sebagaimana dipersyaratkan, maka ketiga lokasi ini memenuhi syarat sebagai lokasi penelitian, karena merupakan tempat yang arus lalu lintasnya padat, dengan pemakai jalan yang sangat bervariasi mulai dari para pejalan kaki, gerobak dorong, gerobak sapi, becak, bis, truk gandeng, angkuta, mobil pribadi, roda dua, dan sepeda.

Perempatan Ngemplak, merupakan pertemuan antara Jalan Ahmad Yani dari arah sebelah Barat dan Timur, Jalan Jendral Sutoyo dari arah Utara, dan Jalan A. Panjaitan dari arah Selatan. Dekat dengan perempatan ini adalah Pasar Ngemplak. Arus lalu-lintas yang melewati perempatan jalan ini selalu padat, baik yang dari arah Barat (dari arah terminal Bis Gilingan),

dari arah Timur (dari arah luar kota seperti: Sragen, Surabaya ditambah dari kota sendiri), maupun dari arah Selatan dan Utara.

Banyak kejadian mengenai pelanggaran lalu lintas yang masih cukup memprihatikan terjadi di perempatan Ngemplak. Masih sering kedatangan pengemudi yang main serobot meskipun lampu "bangjo" (pengatur lalu lintas) sudah menyala merah, mereka tetap saja melaju. Paling banyak adalah kendaraan roda dua, dan becak. Sikap pengemudi yang demikian sungguh sangat membahayakan. Seharusnya begitu melihat traffic light mulai menyala kuning, pengemudi segera bersiap-siap mengurangi kecepatan untuk kemudian berhenti. Namun, kami melihat di antara pemakai jalan justru menambah kecepatan kendaraannya. Sebagai catatan saja: fenomena semacam ini rupanya bersifat umum, artinya tidak terjadi di perempatan Ngemplak saja tetapi di perempatan-perempatan lain, bahkan di kota-kota lain seperti Semarang misalnya.

Keadaan seperti di atas, kecuali membahayakan akan terjadinya kecelakaan, sering pula kasus main serobot di perempatan jalan menyebabkan



**Gambar 7**

**Truk yang hanya kelihatan bak belakangnya: "nyrobot".**

kemacetan lalu lintas. Tidak heran kalau di perempatan Ngemplak tersebut sering terjadi kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas ini sering terjadi pada jam-jam tertentu, yaitu pagi hari antara jam 07.00 — 08.00 WIB

dan siang hari antara jam 13.00 — 14.00 WIB. Jam-jam ini adalah jam-jam yang sangat padat lalu lintas, karena bertepatan dengan berangkat dan pulang para pelajar dan pekerja.

Perlu diketahui pula di sini bahwa arah utara dari perempatan Ngemplak (melalui jalan Jendral Sutoyo) kurang lebih antara 0,25 km (250 m) sampai dengan 3 km merupakan pusat-pusat pendidikan, seperti, Akademi Administrasi Keuangan Surakarta, UNISRI, Akademi Analisis Kesehatan Surakarta, Akademi Teknik Kimia Surakarta, Akademi Analisis Farmasi Surakarta, Akademi Teknik Gigi Surakarta, Akademi Manajemen Indonesia Surakarta, dan beberapa SLTP dan SLTA. Sehingga wajar saja jika pada jam-jam tertentu arus lalu lintas di perempatan Ngemplak tersebut menjadi semakin padat. Disamping itu hampir segala jenis kendaraan dari yang tradisional (konvensional) hingga yang modern banyak yang melewati perempatan jalan ini.

Selain masalah menyerobot, pemandangan yang nampak di perempatan juga menunjukkan fenomena lain. Pada umumnya para pengendara sepeda motor yang akan ke arah kiri, dari manapun arah datangnya akan dengan enak saja melanjutkan perjalanannya dan tidak berhenti meskipun lampu pengatur jalan menyala merah dan tidak ada tanda yang membolehkan untuk jalan terus. Pelaku penyerobotan jalan tersebut jelas mereka yang sering melewati perempatan jalan tersebut, sebab beberapa kendaraan dan sepeda motor nampak mantap berhenti di sebelah kiri ketika lampu menyala merah. Para pengemudi yang menghentikan kendaraannya nampak kaget ketika dari sampingnya ada yang nyerobot dengan enaknya lalu belok kiri meskipun lampu sedang menyala merah. Kejadian seperti ini dengan mudah dapat dijumpai di perempatan Ngemplak, terutama pada jam-jam orang berangkat kerja dan pelajar berangkat sekolah, atau sebaliknya ketika mereka pulang bekerja atau sekolah.

Para pengendara kendaraan roda dua, pada umumnya juga dengan enaknya berhenti melonjok (melebihi garis batas berhenti) ketika lampu menyala merah. Bahkan sering terjadi tidak hanya melonjok saja, tetapi berhenti di depan garis batas (seharusnya di belakang). Tampak sekali kesan mereka biasa saja, arinya apa yang mereka lakukan itu sebagai hal yang biasa. Perlu diketahui, di perempatan yang arus lalu lintasnya padat tersebut tidak ada pos penjagaan polisi. Tentang hal ini konfirmasi dari pihak kelurahan katanya telah mengusulkan, tinggal menunggu realisasinya saja.

Jalan A. Yani yang merupakan jalan utama yang melewati perempatan Ngemplak, merupakan jalan yang tidak begitu lebar. Hal itu sering menimbulkan masalah tersendiri. Seringkali kemacetan ditimbulkan bukan karena pengemudi yang nyerobot, tidak mematuhi aturan, dan sejenisnya,



tetapi karena jalan yang tidak begitu lebar, sementara arus lalu lintasnya padat. Dengan demikian jika ada sebuah Bis umum yang berhenti di sekitar perempatan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang pada saat jam-jam padat, menyebabkan jalan menjadi macet. Apalagi kalau pengemudi di belakang bis yang berhenti tersebut tidak sabar dan ingin mendahului, maka dapat menimbulkan kemacetan karena arus kendaraan dari arah yang sama maupun yang berlawanan beruntun. Lebih sulit lagi karena seringkali masing-masing pengemudi tidak ada yang mau mengalah, tetapi juga karena masing-masing sulit untuk mundur lagi karena di belakangnya telah berderet-deret kendaraan lain dengan jarak yang dekat.

Sering terjadi Bis umum yang berhenti di depan pasar Ngeplak untuk menurunkan atau menaikkan penumpang itu tidak hanya satu. Bahkan tidak jarang juga bis-bis tersebut berhenti pada jarak hanya sekitar 5 meter dari perempatan, sehingga selain menghalangi pemandangan pengendara kendaraan dari arah utara (Jalan Jendral Sutoyo) yang akan belok ke kiri, juga tidak memberi tempat yang leluasa bagi kendaraan dari arah Utara tersebut.

Pejalan kaki juga menambah problem sendiri, langsung atau tidak langsung ikut menyumbang munculnya kemacetan lalu lintas tersebut. Hal



**Gambar 8**

**Para penyeberang jalan dan Bis yang berhenti tidak jauh dari perempatan.**

itu disebabkan jalan tidak begitu luas dan tidak ada tempat tersendiri (trotoar) untuk pejalan kaki. Padahal para pejalan kaki cukup banyak yang berlalu lalang di jalan tersebut. Dalam keadaan semacam itu, maka lalu lintas tidak hanya kelihatan padat dan ramai tetapi terkesan menjadi kacau. Ditambah lagi di depan pasar merupakan tempat mangkalnya para pelajar (paling banyak) dan orang lain yang menunggu kendaraan umum.

Para penyeberang jalan juga menambah semrawutnya lalu lintas. Pada umumnya para penyeberang jalan (kecuali yang tua-tua), dengan enaknyanya menyeberang jalan (perempatan) dengan tidak mengindahkan arus lalu lintas dan tanda lampu pengatur lalu lintas (traffic light). Mereka yang berbuat begitu paling banyak adalah para pelajar dengan seragam SLTA dan Sekolah Dasar. Pemandangan seperti itu bagi mereka dan juga orang-orang yang melakukan aktivitas di sekitar tempat itu merupakan hal yang biasa. Hal semacam itu seolah-olah bukan masalah dan tidak akan menimbulkan masalah.

Menurut Pak Radis (tukang becak) yang kebetulan mangkal di pojokan perempatan Ngeplak hal itu biasa, "asal hati-hati ya selamat. Nyatanya selama ini jarang ada kecelakaan di situ. Ada memang, tapi karena kurang hati-hati saja". Keterangan semacam ini juga dibenarkan oleh beberapa pedagang kaki lima yang sudah cukup lama berjualan di sekitar tempat itu. Rupanya bagi mereka, dan mungkin banyak orang yang lain, masalahnya bukan melanggar atau tidak melanggar aturan lalu lintas, melainkan kehati-hatian dalam menyeberang. Mungkin karena persepsi yang seperti itulah, banyak pejalan kaki, pengendara sepeda, dan tukang becak dalam menyeberang di sekitar perempatan itu tidak melihat apakah traffic light itu sedang menyala kuning, hijau atau merah, tetapi yang mereka lihat adalah kendaraan-kendaraan yang sedang lewat. Sehingga kalau ada peluang sedikit saja untuk menyeberang, maka mereka akan dengan cepat menyeberang.

Pelanggaran lalu lintas juga dilakukan oleh para pengemudi angkutan kota (Daihatsu kuning). Sering terlihat mereka dengan enaknyanya "ngetem" menunggu penumpang di dekat traffic light (Jalan Panjaitan). Mereka berhenti tepat pada waktu lampu menyala merah, tetapi ketika lampu menyala hijau mereka tidak berjalan, sehingga kendaraan-kendaraan dibelakangnyalah yang berjalan. Ini memang tidak semua pengemudi angkutan seperti itu, dan tidak setiap waktu dapat dijumpai, tetapi cukup sering terutama pada saat-saat arus lalu lintas tidak begitu padat.

Mangkal di dekat traffic light untuk mencari atau menunggu penumpang juga dilakukan oleh para tukang becak di depan dan di samping pasar Ngeplak (di Jalan A. Yani dan Jalan Letjen Sutoyo). Untuk yang ini dengan mudah dapat dijumpai setiap saat, baik pada jam-jam padat arus lalu



lintas maupun tidak. Bagi orang baru yang melihat suasana seperti itu jelas merasa "terganggu".

Dari uraian di muka, jelaslah bahwa di perempatan Ngemplak cukup mudah dan tidak usah menunggu lama untuk melihat pelanggaran aturan lalu lintas. Baik yang dilakukan oleh: tukang becak, penyeberang jalan, pengendara sepeda, maupun pengendara sepeda motor. Sedangkan untuk pengendara kendaraan roda empat prosentasenya tidak begitu besar, pada umumnya malah tidak melakukan, hanya beberapa di antara mereka sering nyerobot (bagi mereka nyerobot itu syah saja, dianggap belum melanggar).

Di lokasi pengamatan lain, yaitu di simpang empat Gilingan dan simpang tiga Gilingan, situasinya tidak banyak berbeda. Bahkan untuk perempatan Gilingan karena tidak ada traffic lightnya keadaannya lebih semrawut, dan pada jam-jam tertentu setiap harinya mesti macet. Kemacetan tersebut terjadi pada jam-jam tertentu, yaitu pagi hari antara jam 07.00 — 09.00 WIB, dan sore hari antara jam 15.00 — 16.00 WIB. Pada jam-jam ini arus lalu lintas terutama dipadati oleh pengendara sepeda yang berasal dari Kaliyoso dan Nusukan. Mereka adalah para pekerja pabrik yang nglaju (penglaju), kebanyakan adalah para wanita.

Perlu digambarkan di sini, perempatan Gilingan adalah pertemuan antara Jalan A. Yani arah Barat dan Timur, Jalan Kapten P. Tendean dari arah Utara (dari dan ke Nusukan), dan Jalan Rabindranat Tagore dari arah Selatan (paling banyak kendaraan yang keluar dari Terminal Bis Gilingan). Di perempatan Gilingan ini terdapat satu pos penjagaan polisi (pojok Barat Daya) yang sering kosong. Selain itu dekat dengan perempatan (di jalan A. Yani) terdapat dua rambu-rambu lalu lintas "dilarang berhenti" di sekitar tempat itu, tetapi justru banyak kendaraan yang berhenti di-situ dan Tukang Becak juga mangkal di situ.

Terjadinya kemacetan lalu lintas di perempatan Gilingan ini, selain karena arus kendaraan yang cukup padat dan ditambah pada jam-jam tertentu banyaknya para pekerja penglaju yang bersepeda, juga karena kondisi jalannya yang kapasitasnya memang tidak besar. Terutama Jalan Ahmad Yani sudah waktunya untuk dilebarkan. Demikian juga jembatan di Jalan Kapten P. Tendean yang menghubungkan antara Kelurahan Gilingan dengan Kelurahan Nusukan sudah waktunya untuk dilebarkan. Beruntung bahwa masalah ini sudah menjadi perhatian dan pemikiran pemerintah Daerah Kota Madia Surakarta. Khususnya mengenai pelebaran jalan A. Yani, dalam waktu dekat sudah akan direalisasikan pelaksanaan pelebarannya. Pekerjaan ini nampaknya bersamaan (satu paket) dengan pindahnya Kantor Kelurahan Gilingan (terletak di jalan Rabindranat Tagore) ke Brumbung, dan proses pelebaran Terminal Bis Gilingan.

Tentang padat dan semrawutnya arus lalu lintas di perempatan Gilingan, menurut penuturan Pak Atma alias Ngatino hal itu sudah terjadi lama, paling tidak sepuluh tahun yang lalu pun keadaannya sudah seperti itu. Pak Ngatino (begitu dia lebih senang dipanggil) adalah seorang pedagang kaki lima (angkringan) yang sudah berjualan Es dan makanan kecil di sekitar perempatan Gilingan selama kurang lebih sepuluh tahun. Ia berjualan mulai pagi hingga petang hari (menjelang malam). Tempat tinggalnya di Kelurahan Nusukan. Kesannya terhadap para pemakai jalan yang lewat di perempatan Gilingan kurang lebih sama dengan Pak Radis (tukang becak yang sering mangkal di perempatan Ngemplak), bahwa "meskipun arus lalu lintas disitu semrawut asal hati-hati sendiri ya akan selamat".



**Gambar 9**  
**Suasana di Perempatan Gilingan**

Kesemrawutan lalu lintas di tempat itu nampaknya bukanlah suatu masalah, artinya itu wajar saja, dari dulu ya begitu. Selanjutnya dikatakan bahwa "meskipun arus lalu lintas semrawut kejadian kecelakaan di situ jarang sekali". Kesan yang kurang lebih sama juga diungkapkan oleh Pak Hartoko (sopir bis) yang sudah kurang lebih enam tahun lewat jalan itu. Pendapat mereka seragam, bahwa jalan Ahmad Yani memang sudah waktunya untuk dilebarkan, dan mereka menyambut dengan senang adanya rencana pelebaran jalan tersebut.

Hasil pengamatan penulis di pertigaan Gilingan juga menunjukkan suasana yang tidak banyak berbeda. Pertigaan Gilingan ini merupakan pertemuan antara Jalan Ahmad Yani dari arah Barat dan Timur dengan Jalan S. Parman dari arah Selatan. Di tengah-tengah pertigaan ada rambu-rambu lalu lintas (traffic light). Para pejalan kaki pada umumnya menggunakan trotoar di depan pertokoan (terutama yang di jalan S. Parman). Di sepanjang kurang lebih 35 meter dari pertigaan di sebelah selatan Jalan Ahmad Yani merupakan tempat mangkal tukang becak. Sedangkan lebih kurang 15 meter sebelah utara pertigaan merupakan Stanplat Travel Gilingan.

Para pemakai jalan dari arah Selatan (jalan S. Parman) baik roda dua, becak, maupun roda empat yang akan belok ke kiri, pada umumnya tidak memperhatikan traffic light, artinya hijau ya jalan, merah ya jalan, kuning ya jalan. Jadi ada kesan bahwa traffic light itu hanya berlaku untuk pemakai jalan (kendaraan) yang akan belok ke kanan saja. Demikian juga yang dari arah jalan Ahmad Yani dari Barat yang akan ke arah Timur juga sama, bedanya kalau dari arah ini para pengendara roda empat pada umumnya berhenti pada saat lampu merah. Tetap yang paling semrawut dan "seolah-olah tidak ada aturan" adalah para abang becak, dan pengendara sepeda baik tua, muda, maupun anak-anak sekolah.

Rambu lalu lintas yang merupakan tanda dilarang berhenti di pojok pertigaan jalan Ahmad Yani, juga seolah-olah tidak pernah ada. Beberapa Bis Umum jurusan Sragen sering menaikkan dan menurunkan penumpang di sekitar tanda larangan tersebut. Sedangkan pemandangan lain nampak ikut menjadikan jalan di sekitar pertigaan itu kurang tertib adalah keberadaan para pedagang kaki lima seperti penjual minuman dan makanan di angkringan (gerobak dorong), dan penjual pakaian bekas, ditambah bengkel sepeda motor, kesemuanya menggelar kegiatan mereka di trotoar depan rumah atau toko (yang tutup) di sekitar jalan S. Parman.

Melihat seringnya para pemakai jalan tidak atau kurang menghiraukan rambu-rambu atau tanda-tanda lalu lintas, nampaknya dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran dan anggapan yang keliru. Seolah-olah tanda-tanda atau rambu-rambu lalu lintas itu baru berlaku segi-segi kekuatan hukumnya kalau ada polisi. Adanya anggapan seperti itu rupanya masih menghinggapi banyak pemakai jalan. Tidak heran kalau kita sering mendengar kata-kata: "awas jangan berhenti di situ ada polisi". Bagi para kenek, kondektur atau sopir angkutan juga sering terdengar kata-kata serupa: "penumpang jangan turun di sini ada polisi"; "jangan menaikkan penumpang di sini ada polisi", dan kata-kata lain sejenisnya yang intinya menyatakan "jangan melanggar karena ada polisi".

Fenomena seperti itu dapat dikatakan bersifat dan berlaku umum. Maksudnya setiap tindakan apa saja yang sebenarnya melanggar atau tidak disiplin terhadap ketentuan lalu lintas akan tetap dilakukan dengan tenang kalau tidak ada polisi. Sebut saja misalnya dari mulai SIM, STNK, Helm, dan kelengkapan-kelengkapan lain bagi pengendara kendaraan bermotor. Tentang pemakaian helm misalnya, masih sering dijumpai pengendara roda dua yang tidak berhelm. Bahkan ada (umumnya remaja), sudah jelas-jelas membawa helm tetapi tidak dikenakan, baru setelah mendekati tempat yang ada pos polisinya dikenakan. Hal semacam itu memang tidak banyak yang berbuat, tetapi sering kita jumpai, dan terjadi tidak hanya di Surakarta saja, tetapi di kota-kota lain juga.

## **BAB V**

### **UPAYA PEMBINAAN DISIPLIN PADA MASYARAKAT KOTA**

Seperti telah dikemukakan di bagian muka, pada hakekatnya ada beberapa faktor utama yang menyebabkan perkembangan sebuah kota pada umumnya, yaitu pertambahan penduduk alami maupun karena urbanisasi (migrasi desa-kota) yang relatif cepat, dan perkembangan aktivitas dunia usaha serta perubahan kehidupan penduduk yang juga relatif cepat. Semuanya itu membutuhkan berbagai fasilitas dan sarana pelayanan, seperti perumahan, pelayanan sosial, angkutan (transportasi), air bersih, dan pelayanan-pelayanan sosial lainnya. Akan tetapi dengan segala keterbatasan yang ada, keadaan seperti itu justru menimbulkan permasalahan perkotaan pada umumnya.

Kota dengan penduduknya yang relatif padat tetapi dengan luas wilayah yang relatif terbatas, cenderung tumbuh dan berkembang lebih cepat dari daerah sekelilingnya. Hal yang demikian lebih menarik bagi pendatang dari luar kota serta mendorong arus urbanisasi yang selalu menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Gejala pertumbuhan dan pemekaran wilayah kota yang lebih cepat ternyata telah menimbulkan berbagai benturan nilai-nilai sosial-budaya, sehingga memerlukan sistem administrasi, wewenang, yurisdiksi dan dinamisasi yang berbeda dengan wilayah non-perkotaan.

Kota yang mempunyai daya tarik lebih besar akan mempercepat tingkat pertumbuhan jumlah penduduknya, sehingga mengakibatkan semakin membengkaknya tuntutan kebutuhan di segala bidang kehidupan. Membengkaknya tuntutan kebutuhan di segala bidang kehidupan tersebut juga dapat disebabkan oleh belum sesuai atau serasinya nilai-nilai baru dengan persyaratan norma kehidupan perkotaan, dan hal ini terus berjalan secara berantai. Hal ini disebabkan karena dengan terpenuhinya kebutuhan yang satu akan muncul kebutuhan-kebutuhan baru yang lain, seiring dengan derasnya arus urbanisasi.

Pertambahan penduduk yang tinggi (secara alami maupun urbanisasi) dan kurangnya berbagai prasarana dan sarana kehidupan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan di daerah perkotaan. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi di kota besar di Indonesia termasuk kota Surakarta antara lain adalah masalah pencemaran lingkungan sebagai akibat pengelolaan limbah yang kurang benar. Masalah transportasi, masalah kesempatan

kerja (pengangguran), masalah pemukiman yang kurang memenuhi persyaratan hidup (gubuk-gubuk liar), masalah PKL (pedagang kaki lima), pedagang asongan, kemacetan lalu lintas dan berbagai masalah sosial kemasyarakatan seperti kriminalitas, tuna wisma, dan tuna susila.

Ketatnya persaingan masyarakat untuk mendapatkan prasarana dan sarana kehidupan tidak jarang menyebabkan orang kurang memperhatikan orang lain (individualistis) demi untuk pemenuhan kebutuhan pribadinya. Sehubungan dengan hal itu, kurangnya pemahaman sejumlah warga kota terhadap lingkungannya di mana mereka tinggal, juga mempunyai andil yang cukup besar terhadap munculnya berbagai permasalahan di perkotaan. Selain itu terdapatnya sejumlah warga kota yang masih bersikap dan berperilaku seperti di daerah asalnya, juga ikut menambah kompleksitasnya suatu permasalahan kota.

Munculnya permasalahan di daerah perkotaan tersebut antara lain sangat dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan warga kota dalam mentaati segala peraturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Seperti telah disinggung di muka, bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki aturan-aturan, kaidah-kaidah sosial, dan pengendalian sosial tertentu untuk menjaga keberlangsungan kelompoknya itu. Demikian pula halnya dengan kelompok masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Sehubungan dengan itu pula, untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat perlu adanya pembinaan disiplin terhadap warga masyarakat yang bersangkutan.

Dalam kehidupan sehari-hari berbagai permasalahan muncul diperkotaan. Perpaduan antara kurang memudahinya prasarana dan sarana kehidupan, dengan kurangnya pemahaman warga kota terhadap tata aturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku di perkotaan diduga menyebabkan kurang disiplin warga masyarakatnya. Baik disiplin dalam penanganan limbah keluarga, kegiatan sosial, administrasi pemerintahan, lingkungan pasar, terminal, tempat hiburan, maupun di jalan raya. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka selain partisipasi masyarakat secara aktif sangat diharapkan, pembinaan perlu terus dilakukan baik oleh Pemerintah maupun oleh Tokoh-tokoh Masyarakat.

Sampah atau limbah merupakan masalah yang cukup memusingkan yang lazim dihadapi oleh wilayah perkotaan. Pemerintah daerah pada umumnya termasuk Pemda Kordia Surakarta dihadapkan pada problem produksi limbah yang berlebihan sehingga menyulitkan pembuangannya. Produksi sampah yang berlebihan menuntut penanganan serius jika sebuah kota ingin tampil indah, bersih, dan rapi. Untuk keperluan itu pemerintah daerah berusaha terus meningkatkan kapasitas daya angkut armada sampah yang telah tersedia.

Dalam beberapa hal, penanganan masalah limbah (sampah) ini sangat pelik. Jika kurang hati-hati dalam penanganannya justru akan menimbulkan masalah lain yang lebih sulit. Apabila masalah armada dapat tertangani misalnya, masih harus memikirkan tempat pembuangan akhir yang representatif. Sebab penumpukan sampah pada umumnya akan menimbulkan bau busuk yang jelas tidak disukai oleh masyarakat. Penyelesaian masalah tersebut jelas harus dicari tempat yang cukup jauh dari pemukiman penduduk. Inilah tantangan yang harus dihadapi oleh setiap pemerintah daerah, termasuk pemerintah daerah Kodia Surakarta, yang ingin wilayahnya bersih, sehat, rapi, dan indah.

### **A. Pembinaan oleh Pemerintah**

Dalam rangka pembinaan disiplin masyarakat terhadap penanganan limbah, baik di kalangan keluarga, maupun di tempat-tempat umum, pemerintah Kota Madia Daerah Tingkat II Surakarta sudah cukup lama dan secara bertahap telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka menangani masalah K3 (kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota). Dengan diperolehnya dan dipertahankannya Adipura yang merupakan penghargaan tertinggi dari Presiden di bidang kebersihan perkotaan, membuktikan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Madia Daerah Tingkat II Surakarta tidak sia-sia. Hal ini juga menunjukkan bagaimana respon dari masyarakat yang cukup positif. Partisipasi masyarakat Surakarta sungguh dapat dibanggakan. Meskipun demikian pembinaan-pembinaan tetap terus dilakukan oleh Pemda secara intensif.

Perlu disadari pula bahwa tidaklah mudah mengubah kebiasaan hidup suatu masyarakat. Hal itu sangat membutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Membangun sarana fisik yang menunjang kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota memang mudah, tetapi membudayakan hidup bersih dan sehat serta tertib itu memerlukan waktu. Namun demikian, melalui upaya yang terus menerus, seperti penyuluhan, lomba, pemberian contoh hidup bersih dan sehat, memberikan proyek-proyek percontohan dan lain-lainnya. Sekarang budaya untuk hidup bersih dan sehat serta tertib nampaknya mulai terwujud menjadi kenyataan.

Upaya memasyarakatkan program Solo BERSERI di Kota Madia Daerah Tingkat II Surakarta telah berhasil menumbuhkan partisipasi masyarakat yang positif dan tinggi. Kegiatan penyuluhan terus menerus yang dilakukan oleh Tim kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota yang melibatkan ibu-ibu PKK di tiap kelurahan, kini telah menunjukkan hasilnya. Kecuali munculnya taman-taman hasil swadaya masyarakat, kini hampir



setiap RT di seluruh kelurahan yang ada di Kota Madia Daerah Tingkat II Surakarta telah mempunyai paguyuban atau kelompok-kelompok yang bergerak dalam bidang kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota.

Paguyuban atau kelompok-kelompok tersebut secara swadaya merumuskan permasalahan bidang kebersihan, keindahan, dan ketertiban di lingkungannya sendiri-sendiri, serta berusaha untuk memecahkan permasalahan tersebut juga secara swadaya. Melalui wadah baru tersebut program Solo BERSERI makin membudaya dan diharapkan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dalam keadaan seperti itu, maka bentuk partisipasi masyarakatnya tidak lagi bersifat dimobilisasikan tetapi telah menjadi partisipasi yang bersifat otonom atau swakarsa.

Paguyuban-paguyuban yang bergerak di bidang kebersihan keindahan, dan ketertiban kota di setiap RT tersebut menjadi ajang kegiatan warga dalam ikut serta menyukseskan program Solo BERSERI. Dengan munculnya paguyuban-paguyuban dalam bidang kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota di tingkat RT, berarti masalah kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota kini bukan lagi semata-mata merupakan program pemerintah, tetapi telah menjadi gerakan masyarakat yang memiliki akar kuat. Dengan demikian campur tangan aparat pemerintah dalam bidang kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota dapat makin dikurangi, karena pada umumnya telah diprakarsai oleh masyarakat sendiri.

Perubahan dari "program pemerintah" menjadi "gerakan masyarakat" telah lebih mengefektifkan sasaran terwujudnya wilayah Kota Madia Daerah Tingkat II Surakarta yang bersih, sehat, rapi, indah (Berseri) sebagaimana telah menjadi tekad pemerintah Kota Madia Daerah Tingkat II Surakarta sejak dicanangkannya slogan "Surakarta Berseri" atau "Solo Berseri". Apalagi telah tersedia juga perangkat hukum yang mendukung terwujudnya kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota, yaitu peraturan daerah (perda) No. 4 Tahun 1987 tentang KEBERSIHAN KOTA. Meskipun belum sepenuhnya dilaksanakan, khususnya untuk daerah-daerah pinggiran, namun setidaknya Peraturan Daerah tersebut telah ikut merekayasa tertib sosial masyarakat dalam bidang kebersihan keindahan, dan ketertiban kota.

Dalam rangka penanganan limbah keluarga, setiap penduduk diwajibkan menyediakan tempat sampah berupa tong-tong sampah atau keranjang-keranjang sampah di depan rumahnya. Dalam kenyataannya, tempat sampah tersebut pada umumnya seragam, terutama karena kesepakatan tiap RT. Sedangkan untuk membuangnya ke tempat bak penampungan sampah besar yang diangkut oleh mobil sampah yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, sudah ada petugas khusus.

Untuk kelancaran proses pembuangan sampah dari rumah ke rumah



menuju pembuangan umum tersebut, setiap kepala keluarga ditarik restribusi kebersihan kota rata-rata sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah). Dikatakan rata-rata karena dalam prakteknya dilapangan (di lokasi penelitian) besarnya restribusi ini untuk masing-masing keluarga dibeda-bedakan. Besarnya pembedaan ini masing-masing keluarga dibeda-bedakan. Besarnya pembedaan ini masing-masing RT tidaklah sama, yang pasti semua itu berdasarkan kesepakatan melalui musyawarah di dalam rapat tingkat RT. Pembedaan ini dilakukan antara lain didasari oleh pertimbangan kemampuan yang tidak sama dan adanya kesepakatan untuk membebaskan iuran itu bagi keluarga-keluarga tertentu yang tidak mampu.

Selain masalah kebersihan limbah keluarga yang penanganannya seperti telah digambarkan di muka, dalam rangka membersihkan lingkungan, pemerintah daerah juga selalu menganjurkan agar masyarakat juga sering melakukan gerakan kebersihan secara gotong-royong tersebut dihimbau atau diharapkan agar dilakukan secara periodik berdasarkan kesepakatan bersama.

Untuk memotivasi masyarakat dalam hal kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan, pemerintah daerah dalam setiap tahunnya selalu mengadakan lomba kebersihan Lingkungan antar Kelurahan, dan hasilnya ternyata sangat positif. Pembinaan juga dilakukan melalui sarasehan, paguyuban tentang kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota mulai dari tingkat RT, RW, dukuh, kelurahan, kecamatan, dan kodia. Biasanya Walikota Surakarta tiap 35 hari sekali mengadakan sarasehan dan temu muka dengan masyarakat umum, dari satu kelurahan ke kelurahan yang lain secara bergantian. Dalam kesempatan ini aspirasi masyarakat secara langsung akan ditampung, yang tentunya akan dapat membantu dalam pembuatan kebijaksanaan maupun perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaannya.

Sedangkan dalam rangka pembinaan disiplin masyarakat di jalan raya oleh pemerintah, pembinaannya dilakukan secara terpadu (tidak hanya di Surakarta saja tetapi di jajaran Polda Jateng) melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan baik tempat-tempat khusus (ruangan) maupun di jalan raya, dan operasi-operasi di jalan raya. Upaya yang terakhir inilah (operasi di jalan) yang prosentasenya paling menonjol (sering) dilakukan.

Dalam rangka pembinaan disiplin berlalu-lintas kegiatan-kegiatan operasi lalu lintas sudah sering dilakukan. Operasi tersebut biasanya menggunakan sandi-sandi khusus seperti Operasi Patuh, Operasi Lilin, Operasi Ketupat, Operasi Rutin, Operasi Zebra, dan sandi-sandi operasi lain di bidang lalu lintas. Walaupun antara sandi yang satu dengan yang lain berbeda sebenarnya sasaran utamanya tetap sama, yaitu untuk meningkatkan disiplin dan tertib para pemakai jalan, sekaligus untuk menekan jumlah kece-

lakaan dan korban di jalan raya. Di antara sekian sandi operasi lalu-lintas, yang dianggap paling "berbobot" adalah Operasi Zebra. Bagi pemakai jalan, operasi Zebra ini paling membuat keder, atau sering dianggap sebagai momok.

Operasi Zebra muncul pertama kalinya pada tahun 1985. Dalam pelaksanaan Operasi Zebra, bukan hanya pelanggaran yang berat saja yang ditindak tegas, tetapi pelanggar yang paling kecil pun juga terjaring oleh operasi ini. Ternyata hasilnya cukup menggembirakan, yakni mampu menekan jumlah pelanggaran dan kecelakaan yang menelan korban baik jiwa maupun materi di jalan raya.

Mengawali tahun 1993 ini jajaran Polda Jawa Tengah melancarkan kembali Operasi Zebra yang dimulai sejak tanggal 4 Januari 1993, dan akan berlangsung selama 55 hari. Operasi Zebra kali ini tidak lain juga diarahkan sebagaimana ketika muncul pertama kali, meskipun pelaksanaan di lapangan mengalami sedikit perubahan. Kegiatan operasi kali ini juga bersamaan pula dengan pelaksanaan kegiatan operasi khusus dengan sasaran khusus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Karena itu selama pelaksanaan operasi selalu diikuti dengan petugas unsur reserse, karena jika ternyata terjaring kendaraan yang dicurigai terlibat kejahatan, bisa segera ditangani cepat.

Dalam pelaksanaan operasi kali ini, diawali dengan penyuluhan kepada warga pemakai jalan. Bagi mereka yang kendaraannya memiliki kekurangan, diminta untuk segera melengkapinya. Masyarakat juga diingatkan agar selalu disiplin dan tertib di jalan dengan mematuhi rambu-rambu yang ada. Pelaksanaan operasi kali ini juga dilakukan secara gabungan dengan melibatkan unsur lain, seperti Pom ABRI, Kodim, Pemda, DLLAJR dan aparat terkait.

Dari uraian singkat di atas, jelaslah bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berbagai aktivitas kehidupan yang dalam penelitian ini meliputi disiplin dalam penanganan limbah (dalam keluarga maupun di tempat umum) dan disiplin di jalan raya; pemerintah dengan berbagai caranya secara berkelanjutan melakukan kegiatan-kegiatan baik melalui kebijakan-kebijakan, lomba-lomba, penyuluhan-penyuluhan, maupun operasi-operasi.

## **B. Pembinaan oleh Tokoh Masyarakat**

Pembinaan disiplin masyarakat dalam berbagai kegiatan bukanlah tanggungjawab pemerintah saja, melainkan tanggungjawab bersama, khususnya para tokoh-tokoh masyarakat. Para tokoh masyarakat baik tokoh formal maupun nonformal secara langsung mempunyai beban moral untuk melakukan pembinaan tersebut. Dalam hal ini mereka langsung atau tidak

langsung merupakan tokoh-tokoh panutan masyarakat yang ucapan kata-katanya maupun perilakunya selalu disoroti dan berusaha untuk diikuti oleh masyarakat awam.

Di lokasi penelitian, tokoh-tokoh masyarakatnya baik tokoh formal maupun nonformal cukup aktif. Bagi tokoh-tokoh formal dalam kapasitasnya sebagai petugas pemerintah sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk dengan sekuat tenaganya berusaha mensukseskan program-program dan kebijakan pemerintah. Bahkan seringnya kelurahan Gilingan diikutsertakan dalam lomba-lomba desa (kelurahan) secara langsung mendorong para tokoh-tokoh formalnya untuk lebih banyak berbuat untuk kelurahannya.

Sedangkan tokoh-tokoh nonformalnya, di lokasi penelitian juga aktif mengadakan pembinaan-pembinaan. Dalam hal ini munculnya gerakan sarasehan-sarasehan di tiap RT, secara langsung telah melibatkan tokoh-tokoh formal maupun nonformal dalam rangka lebih membudayakan masalah kedisiplinan warga pada umumnya. Apalagi para tokoh-tokoh nonformal pada umumnya terlibat langsung sebagai anggota atau pengurus LKMD. Lembaga ini sebagaimana telah dikemukakan di muka, merupakan sentral dari organisasi-organisasi sosial di tingkat kelurahan.

Menyadari kedudukannya sebagai tokoh panutan di lingkungannya, dalam banyak hal para tokoh masyarakat di lokasi penelitian, selain memberikan penerangan-penerangan dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan bersama, juga dalam berbagai kegiatan dalam rangka melaksanakan segala aturan baik aturan pemerintah maupun aturan berdasarkan kesepakatan bersama selalu berbuat lebih dulu. Sebagai contoh misalnya dalam hal-hal: membayar restribusi, membayar PBB, siskamling, selalu datang atau menghadiri pada rapat atau sarasehan yang diselenggarakan bersama, menyediakan tempat sampah, merapikan pagar halamannya dan sebagainya. Dengan tindakan-tindakannya yang seperti itulah, maka masyarakat sekitarnya langsung atau tidak langsung mengikutinya. Gambaran seperti itu tidaklah berlebihan, sebab setiap kali ada lomba kelurahan seperti lomba K3 misalnya, maka dalam peninjauan yang akan kelihatan dahulu adalah lingkungan disekitar mereka. Karena pada umumnya tempat tinggal para tokoh formal maupun nonformal dalam banyak hal kelihatan lebih bersih, rapi dan indah (pada umumnya mereka adalah orang-orang yang cukup terpendang, cukup berhasil baik pendidikan maupun segi-segi materinya).

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai akhir dari laporan hasil penelitian tentang Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kota Daerah Jawa Tengah, maka akan disajikan kesimpulan kesimpulan seperti di bawah ini.

1. Pertambahan penduduk yang tinggi (secara alami maupun urbanisasi) dan kurangnya berbagai prasarana dan sarana kehidupan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan di daerah perkotaan. Munculnya permasalahan di daerah perkotaan tersebut antara lain sangat dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan warga kota dalam mentaati segala peraturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku, baik disiplin dalam penanganan limbah keluarga, dalam kegiatan sosial, administrasi pemerintahan, lingkungan pasar, terminal, tempat hiburan, maupun di jalan raya.
2. Sampah atau limbah merupakan masalah yang cukup memusingkan yang dihadapi oleh Pemerintah daerah Kodia Surakarta. Untuk keperluan itu pemerintah daerah berusaha terus meningkatkan kapasitas daya angkut armada sampah yang telah tersedia. Dalam beberapa hal, penanganan masalah limbah (sampah) ini sangat pelik. Jika kurang hati-hati dalam penanganannya justru akan menimbulkan masalah lain yang lebih sulit. Karena masalah armada dapat tertangani misalnya, masih harus memikirkan tempat pembuangan akhir yang representatif. Dalam hal ini pemerintah daerah Kodia Surakarta telah mengantisipasi segala kemungkinan tersebut.
3. Kesadaran masyarakat di lokasi penelitian untuk berdisiplin cukup tinggi, terutama dalam hal-hal disiplin untuk menangani limbah keluarga maupun di tempat-tempat umum seperti terminal, pasar, dan gedung bioskop; disiplin dan partisipasi dalam kegiatan sosial; dan disiplin dalam administrasi pemerintahan. Sedangkan disiplin di jalan raya khususnya kasus di lokasi penelitian (Gilingan) masih rendah. Seperti telah digambarkan di muka gambaran tentang disiplin di jalan raya ini tidak dapat digeneralisasikan terhadap lokasi-lokasi lain di Kodia Surakarta. Daerah Gilingan terutama di persimpangan-persimpangan sepanjang jalan Ahmad Yani memang situasi dan kondisinya lain. Tetapi bagaimanapun juga hal ini memerlukan perhatian dan penanganan yang baik.
4. Dalam rangka pembinaan terhadap disiplin masyarakat terhadap penanganan limbah, baik di kalangan keluarga maupun di tempat-tempat umum, pemerintah Kota Madia Daerah Tingkat II Surakarta secara berta-

hap telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka menangani masalah K3 (kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota). Kebijakan-kebijakan tersebut adalah dicanangkannya program "SOLO BERSERI" dan perangkat hukum yang mendukung terwujudnya kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota, yaitu peraturan daerah (perda) No. 4 Tahun 1987 tentang KEBERSIHAN KOTA. Meskipun belum sepenuhnya dilaksanakan, khususnya untuk daerah-daerah pinggiran, namun setidaknya Peraturan Daerah tersebut telah ikut merekayasa tertib sosial masyarakat dalam bidang kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota.

5. Upaya memasyarakatkan program Solo BERSERI telah berhasil menumbuhkan partisipasi masyarakat yang positif dan tinggi. Kecuali munculnya taman-taman hasil swadaya masyarakat, kini hampir setiap RT di Kota Madya Surakarta telah muncul kelompok-kelompok yang bergerak dalam bidang K3. Kelompok-kelompok tersebut secara swadaya merumuskan permasalahan bidang K3, dan secara swadaya berusaha untuk memecahkan permasalahan tersebut. Melalui kegiatan itu program Solo BERSERI makin membudaya dan diharapkan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dalam keadaan seperti itu, bentuk partisipasi masyarakatnya tidak lagi bersifat dimobilisasikan tetapi telah menjadi partisipasi yang bersifat otonom atau swakarsa. Hal ini berarti masalah K3 kini bukan lagi semata-mata merupakan program pemerintah, tetapi telah menjadi gerakan masyarakat yang memiliki akar kuat. Dalam hal ini campur tangan aparat pemerintah dalam bidang K3 makin berkurang. Perubahan dari "program pemerintah" menjadi "gerakan masyarakat" telah lebih mengefektifkan sasaran terwujudnya wilayah Kota Madya Surakarta yang bersih, sehat, rapi, indah (BERSERI). Dengan diperolehnya dan dipertahankannya Adipura yang merupakan penghargaan tertinggi dari Presiden di bidang kebersihan perkotaan, membuktikan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Surakarta tidak sia-sia. Hal itu juga menunjukkan respon masyarakat yang cukup positif.
6. Dalam rangka penanganan limbah keluarga, setiap penduduk diwajibkan menyediakan tempat sampah berupa tong-tong sampah atau keranjang-keranjang sampah di depan rumahnya. Dalam kenyataannya tempat sampah tersebut pada umumnya seragam, terutama karena kesepakatan tiap RT. Sedangkan untuk membuangnya ke tempat bak penampungan sampah besar yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, sudah ada petugas khusus. Untuk kelancaran proses pembuangan sampah dari rumah ke rumah menuju pembuangan umum tersebut, setiap kepala keluarga ditarik redistribusi kebersihan kota rata-rata sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Selain itu, pemerintah daerah juga selalu menganjurkan agar masyarakat juga sering melakukan gerakan kebersihan bersama dalam bentuk kerja bakti. Gerakan kebersihan secara gotong-royong tersebut dihimbau atau diharapkan agar dilakukan secara periodik berdasarkan kesepakatan bersama.

7. Untuk memotivasi masyarakat dalam hal keberhasilan, ketertiban dan keindahan lingkungan, pemerintah daerah dalam setiap tahunnya selalu mengadakan lomba Kebersihan Lingkungan antar Kelurahan, dan hasilnya ternyata sangat positif. Pembinaan juga terus dilakukan melalui sarasehan, paguyuban tentang K3 mulai dari tingkat RT, RW, dukuh, kelurahan, kecamatan, dan kodia. Walikota Surakarta tiap 35 hari sekali mengadakan sarasehan dan temu muka dengan masyarakat umum, dari satu kelurahan ke kelurahan yang lain secara bergantian. Dalam kesempatan ini aspirasi masyarakat secara langsung akan ditampung, yang tentunya akan dapat membantu dalam pembuatan kebijakan-kebijakan maupun perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaannya.
8. Sedangkan dalam rangka pembinaan disiplin masyarakat di jalan raya oleh pemerintah, pembinaannya dilakukan secara terpadu (tidak hanya di Surakarta saja tetapi di jajaran Polda Jateng) melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan baik tempat-tempat khusus (ruangan) maupun di jalan raya, dan operasi-operasi di jalan raya. Operasi pembinaan dan penertiban lalu lintas di jalan raya merupakan terakhir inilah (operasi di jalan) yang prosentasenya program yang paling menonjol dan sering dilakukan. Operasi tersebut biasanya menggunakan sandi-sandi khusus seperti Operasi Patuh, Operasi Lilin, Operasi Ketupat, Operasi Rutin, Operasi Zebra, dan sandi-sandi operasi lain di bidang lalu lintas. Antara sandi yang satu dengan yang lain sebenarnya sasaran utamanya tetap sama, yaitu untuk meningkatkan disiplin dan tertib para pemakai jalan, sekaligus untuk menekan jumlah kecelakaan dan korban di jalan raya. Namun yang paling dianggap “berbobot” adalah Operasi Zebra. Bagi pemakai jalan, operasi Zebra ini paling ditakuti, atau sering dianggap sebagai momok bagi pemakai jalan. Operasi Zebra muncul pertama kalinya pada tahun 1985. Mengawali tahun 1993 ini jajaran Polda Jawa Tengah melancarkan kembali Operasi Zebra yang dimulai sejak tanggal 4 Januari 1993, dan akan berlangsung selama 55 hari. Dalam pelaksanaan operasi kali ini, diawali dengan penyuluhan kepada warga pemakai jalan. Bagi mereka yang kendaraannya memiliki kekurangan, diminta untuk segera melengkapinya. Masyarakat juga diingatkan agar selalu disiplin dan tertib di jalan dengan mematuhi rambu-rambu yang ada.

9. Pembinaan disiplin masyarakat dalam berbagai kegiatan bukanlah tanggungjawab pemerintah saja, melainkan tanggungjawab bersama, khususnya para tokoh-tokoh masyarakat. Para tokoh masyarakat baik tokoh formal maupun nonformal secara langsung mempunyai beban moral untuk melakukan pembinaan tersebut, sebab mereka langsung atau tidak langsung merupakan tokoh-tokoh panutan masyarakat yang ucapan kata-katanya maupun perilakunya selalu disoroti dan berusaha untuk diikuti oleh masyarakat awam.

## **B. Saran-Saran**

1. Meskipun kesadaran masyarakat untuk disiplin dalam banyak hal telah menunjukkan hal yang positif, namun masih perlu ditingkatkan lagi agar masalah kedisiplinan tersebut membudaya, dan mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Forum-forum pertemuan, sarasehan, dan sejenisnya yang telah ada perlu diteruskan. Hal itu hendaknya dilaksanakan tidak hanya dalam rangka menjelang menghadapi lomba atau kunjungan atau peninjauan saja, melainkan secara rutin.
2. Masalah disiplin dan kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan lalu lintas perlu mendapat perhatian khusus. Apalagi kasus di lokasi penelitian ini memang lain. Oleh karena itu tidak hanya jalan yang perlu dilebarkan, tetapi perlu diperbanyak pos-pos penjagaan polisi dan menindak tegas pelanggaran sekecil apapun.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto, (1977). *Pengantar Geografi Kota*. Yogyakarta: VIP. Spring.
- Bintarto, R. (1983). *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budhisantoso, S. (1990). *Organisasi Sosial*. Makalah.
- Daldjoeni, N. (1977). *Puspa Ragam Aspirasi Manusia*. Bandung: Alumni.
- Depdikbud. (1992). *Kerangka Acuan Pembinaan Disiplin Di Lingkungan Masyarakat Kota*. Jakarta.
- Dewanto, (1988). "Disiplin Masyarakat Adalah Modal Keberhasilan Pembangunan" dalam *Media Mitra*. Semarang: YPD.
- Gultom, R. M.S. (1985). *Partisipasi Rakyat Dalam Pembangunan*. Salatiga: UKSW.
- Hans-Dieter Evers, (1982). *Sosiologi Perkotaan (Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia)*. Jakarta: LP3ES.
- Ketetapan MPR No.II/MPR/1988 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- Koentjaraningrat, (1983). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- , (1985). *Kebudayaan dan Mentalitet*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pelly, Usman, (1991). *Sumbangan Budaya Spiritual bagi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Depdikbud.
- Pemda Surakarta, (1990). *Statistik Kotamadya Surakarta*. Surakarta: Kantor Statistik.
- Ramto, Bun Yamin, (1992). "Pola Kebijakan dalam Sistem Pengelolaan Kota" dalam *Prisma No. 5 th. XXI*. Jakarta: LP3ES.
- Singarimbun, Masri. (1987). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Slamet Ryadi, A.L. (1984). *Tata Kota*. Surabaya: Bina Indra Akasara.
- Soedjito S. (1986). *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suara Merdeka (1993), Kamis 7 Januari.
- Sujarto, Djoko. (1992). "Bias Kota Raksasa Serupa Jakarta" dalam *Prisma No. 5 th.XXI*. Jakarta: LP3ES.
- Sutopo, H.B. (1989). *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat pada Posyandu*. Surakarta: UNS.
- Suyatno. (1990). *Sejarah Perkotaan*. Surakarta: UNS.

Perpustakaan  
Jenderal  
711